

**IMPLEMENTASI PROGRAM E-WARUNG
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN**

(Studi pada Dinas Sosial Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan untuk Syarat Menempuh Ujian Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

ADITYA EVANDO MAHEZTRA

145030100111062



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

PRODI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2018

MOTTO

**la membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan
la memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi
manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan
Allah dari awal sampai akhir**

(Pengkhotbah 3:11)

**Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang
ada pada-Ku mengenai kamu, demikian firman Tuhan,
yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan
kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan
yang penuh harapan.**

(Yeremia 29:11)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Implementasi E-Warung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Kasus pada Dinas Sosial Kota Batu)

Disusun oleh : Aditya Evando Maheztra

NIM : 145030100111062

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Malang, 21 Mei 2018

Komisi Pembimbing

Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP, M.AP MMG

NIP. 19810601 200501 1 005

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 23 Mei 2018



Nama: Aditya Evando M.

NIM: 145030100111062

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 5 Juli 2018

Pukul : 09.00 WIB

Skripsi atas nama : Aditya Evando Maheztra

Judul : Implementasi Program E-Warung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)

Dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Alfi Haris Wanta, S.AP., M.AP., MMG
NIP. 19810601 200501 1 005

Anggota



Rispa Ngindana, S.AP., M.AP
NIP. 201405 861106 2 001

Anggota



I Gede Eko Putra Sri Sentanu, S.AP., M.AP, Ph.D
NIP. 20110783 1204 1 000

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang terkasih dan tersayang, atas kasihnya yang berlimpah dan sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih. Teristimewa untuk Nenek, Mama, Papa, Kakak, Adik dan Keluarga Besar yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan cinta kasih yang tiada terhingga serta tiada mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan cinta dan persembahan. Terimakasih Nenek, Mama dan Papa yang selalu membuat saya termotivasi dan yang selalu mendoakan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

RINGKASAN

Aditya Evando Maheztra, 2018, Implementasi Program E-Warung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu), Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP., M.AP., MMG, 174. + XVII

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial masyarakat yang sampai saat ini masih sulit untuk ditanggulangi. Dalam mengatasi permasalahan sosial tersebut, Kementerian Sosial membuat suatu program pemberdayaan masyarakat miskin yang bertujuan menanggulangi kemiskinan melalui program E-Warung. Program E-Warung adalah istilah yang digunakan dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai untuk menyebutkan agen bank, pedagang dan atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan implementasi E-Warung, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan E-Warung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian di Dinas Sosial Kota Batu menunjukkan bahwa pelaksanaan program E-Warung yang ada di Kota Batu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukan program, tetapi masih terjadi beberapa hambatan. Hambatan yang ada adalah kurangnya kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan E-Warung, kurangnya sosialisasi atau penyampaian informasi dalam pelaksanaan E-Warung dan kurangnya konsistensi dari pemerintah pusat dalam mengatur kebijakan tentang program E-Warung. Program E-Warung dibutuhkan sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan, namun memerlukan perbaikan dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia yaitu pengelola E-Warung dan perlunya konsistensi dari Pemerintah Pusat dalam mengatur kebijakan tentang program E-Warung.

Kata Kunci: Implementasi, Kemiskinan, Pemberdayaan, E-Warung

SUMMARY

Aditya Evando Maheztra, 2018, Implementation E-Warung Program to Empowering The Poor People (Study on the Departement Social of Batu City), Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP., M.AP., MMG, 174. +XVII

Poverty is one of the problems in society that have not been resolved until now. In order to solve the poverty, Ministry of Social Affairs creates a program called E-Warung to empowering the poor people. E-Warung is a term used in the Non-Cash Food Assistance Program to call the agent of a bank, trader and or other parties who have cooperated with Distributorship Bank and has been designed as a food purchasing place by Beneficiary Family.

The aim of the study is to know, describe, and analyze the implementation of E-warung and also the supporting and inhibiting factor. This study uses descriptive research and the data will be qualitative data. Sources of data used are primary and secondary data. The data are taken using observation, interview, and documentation. Data analysis that used in this study is data collecting, data reduction, data presentation, and conclusion.

The result of the study in Social service of Batu city shows that the implementation of E-warung in Batu city is well implemented and relevant with the aim of E-warung. However, there are some obstacles in implementing this program which are lack of quality human resources in managing E-Warung, lack of socializing or delivery information about E-Warung and lack of consistency from the central government in regulating policies on E-Warung program. E-Warung program is needed as one of the poverty reduction programs, but it needs improvement in human resource quality who are managing the E-warung and constancy from Central Government in regulating the policies of E-warung program.

Keyword: implementation, Poverty, empowering, E-Warung

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan hanya karena kasih setiaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi E-Warung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin”. Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, arahan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak khususnya:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Alfi Haris Wanto, S.AP., M.AP., MMG selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing serta memberikan arahan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Teristimewa penulis ucapkan kepada Nenek yang biasa saya sebut Mami, Papa Supriono dan Mama Angraeni Maria, selaku orang tua dari penulis dan kakak Fanny Mitha serta adik David Hero Fernando maupun tante dan om yang telah

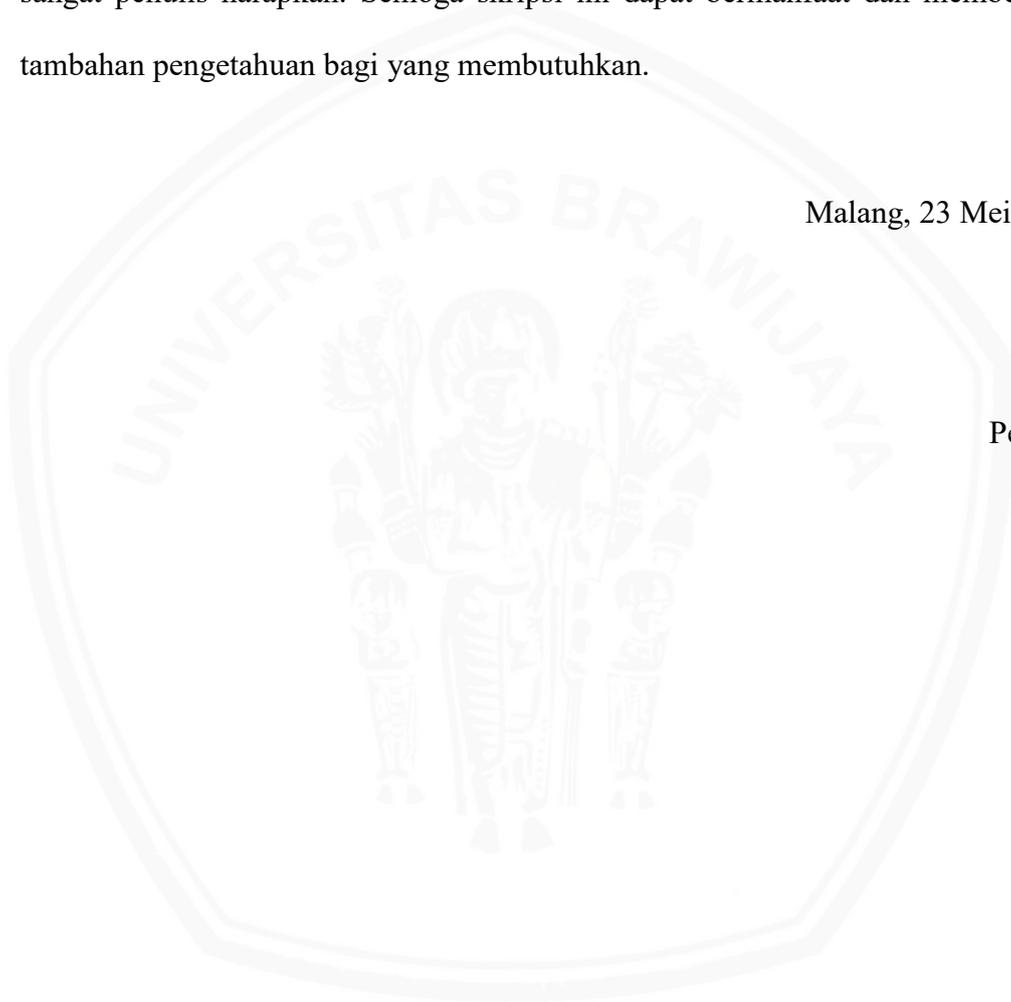
- luar biasa setia menjadi motivasi sekaligus pendukung, penyemangat dan pendoa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat penulis selama bertahun-tahun yaitu Denis, Kelent, Michael, Menyul dan Yogi yang telah saling mendukung dan bersama-sama menjadi seorang sahabat sampai sekarang ini.
 6. Para Sahabat Lebah Madu yaitu Papang, Monic, Mondang, Irwan dan Yessy telah saling mendukung dan mengisi hari-hari penulis dengan aktivitas dan perjalanan-perjalanan yang menyenangkan.
 7. Keluarga PMK Immanuel terkhusus yaitu Fiona, Laila, Theo, Debo, Inke, Devi, Benita, Sella, Yossi, Maga, Bernard, Andi, Niken serta teman-teman pengurus 2014-2015 dan 2016-2017, adik visitasi yaitu Zevera, Indri, Gita, Bertha dan lainnya yang telah saling bertumbuh dan mendoakan dalam persekutuan.
 8. Teman-teman GPDI Elohim dan Perkantas yang senantiasa mendoakan dan menjadi penyemangat selama proses pengerjaan skripsi ini.
 9. Sahabat sukses magang yaitu Dorris, Dendi, Juan, dan Johannes sebagai kelompok magang Dinas Sosial dan yang juga bersama-sama mendaki sampai puncak gunung Arjuno.
 10. Sahabat Black Cobra dan Tya, Lita, Tria, Nisak, Cicit, Clara, Prima, Rama, Kakung, Ary, Inggit yang telah menjadi teman jurusan dan menerima dalam anggota kelompok di masa perkuliahan ini.

11. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membutuhkan.

Malang, 23 Mei 2018

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	II
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	III
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	IV
TANDA PENGESAHAN	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
RINGKASAN	VII
SUMMARY	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XII
DAFTAR TABEL	XV
DAFTAR GAMBAR	XVI
DAFTAR LAMPIRAN	XVII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kebijakan Publik.....	18
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	18
2. Dampak Kebijakan Publik	19
3. Tujuan Kebijakan Publik.....	21
C. Implementasi Kebijakan.....	22
1. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	22
2. Model-Model Implementasi Kebijakan	23
D. Program	40
1. Pengertian Program	40
2. Implementasi Program	41
E. Pemberdayaan Masyarakat.....	46
1. Defenisi Pemberdayaan Masyarakat	46
2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	49
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan.....	51
F. Kemiskinan	53
1. Pengertian Kemiskinan	53
2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan	55
G. Program E-Warung	59
1. Pengertian Program E-Warung	59
2. Tujuan Program E-Warung	60
3. Fungsi Program E-Warung.....	61
4. Kepesertaan Program E-Warung.....	62

5. Besaran Bantuan.....	63
6. Pengelolaan E-Warung dan Barang Dagangan.....	64

BAB III METODE PENELITIAN.....	66
A. Jenis Penelitian.....	66
B. Fokus Penelitian.....	67
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	69
D. Sumber Data.....	70
E. Teknik Pengumpulan Data.....	71
F. Instrumen Penelitian.....	72
G. Metode Analisis Data.....	73

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN	76
A. Gambaran Umum.....	76
1. Gambaran Umum Kota Batu.....	76
a. Sejarah Kota Batu	76
b. Geografis	78
c. Visi dan Misi	81
2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Batu.....	82
a. Visi dan Misi	82
b. Logo Dinas Sosial	85
c. Tugas Pokok dan Fungsi	86
d. Struktur Organisasi	86
B. Penyajian Data.....	89
1. Implementasi Program E-Warung dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin.....	89
a. Isi Kebijakan	99
1. Dasar Hukum Program E-Warung	99
2. Manfaat Program E-Warung	101
3. Harapan dari Program E-Warung.....	107
4. Pihak yang terlibat dalam Implementasi E-Warung	109
5. Sumber daya finansial Program E-Warung.....	115
b. Konteks Implementasi.....	117
1. Strategi aktor yang terlibat dalam implementasi program E-Warung	117
2. Tanggapan yang diberikan para anggota implementasi E-Warung	120
c. Hasil Kebijakan	121
1. Dampak pelaksanaan Program E-Warung	121
2. Perubahan yang diperoleh anggota dalam pelaksanaan E-Warung.....	125
2. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi E-Warung	128
a. Faktor Pendukung program E-Warung	128
b. Faktor Penghambat program E-Warung	134
C. Analisis Data dan Pembahasan	138
1. Implementasi Program E-Warung dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin	138

a.	Isi Kebijakan	142
1.	Dasar Hukum Program E-Warung	142
2.	Manfaat Program E-Warung	144
3.	Harapan dari Program E-Warung.....	145
4.	Pihak yang terlibat dalam Implementasi E-Warung	147
5.	Sumber daya finansial Program E-Warung.....	149
b.	Konteks Implementasi.....	151
1.	Strategi aktor yang terlibat dalam implementasi program E-Warung	151
2.	Tanggapan yang diberikan para anggota implementasi E-Warung	153
c.	Hasil Kebijakan	154
1.	Dampak pelaksanaan Program E-Warung	154
2.	Perubahan yang diperoleh anggota dalam pelaksanaan E-Warung.....	156
2.	Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi E-Warung	157
a.	Faktor Pendukung program E-Warung	157
b.	Faktor Penghambat program E-Warung	158
BAB V PENUTUP		160
A.	Kesimpulan	160
B.	Saran.....	161
DAFTAR PUSTAKA		163
LAMPIRAN		156

DAFTAR TABEL

No. Judul Tabel	Halaman
2.1 Penelitian Terdahulu	15
4.1 Tabel E-Warung	91
4.2 Jumlah Penerima BPNT	92
4.3 Perbandingan Harga Barang Di E-Warung dan Di Pasaran	99
4.4 Perubahan Sebelum dan Sesudah Ada E-Warung	127



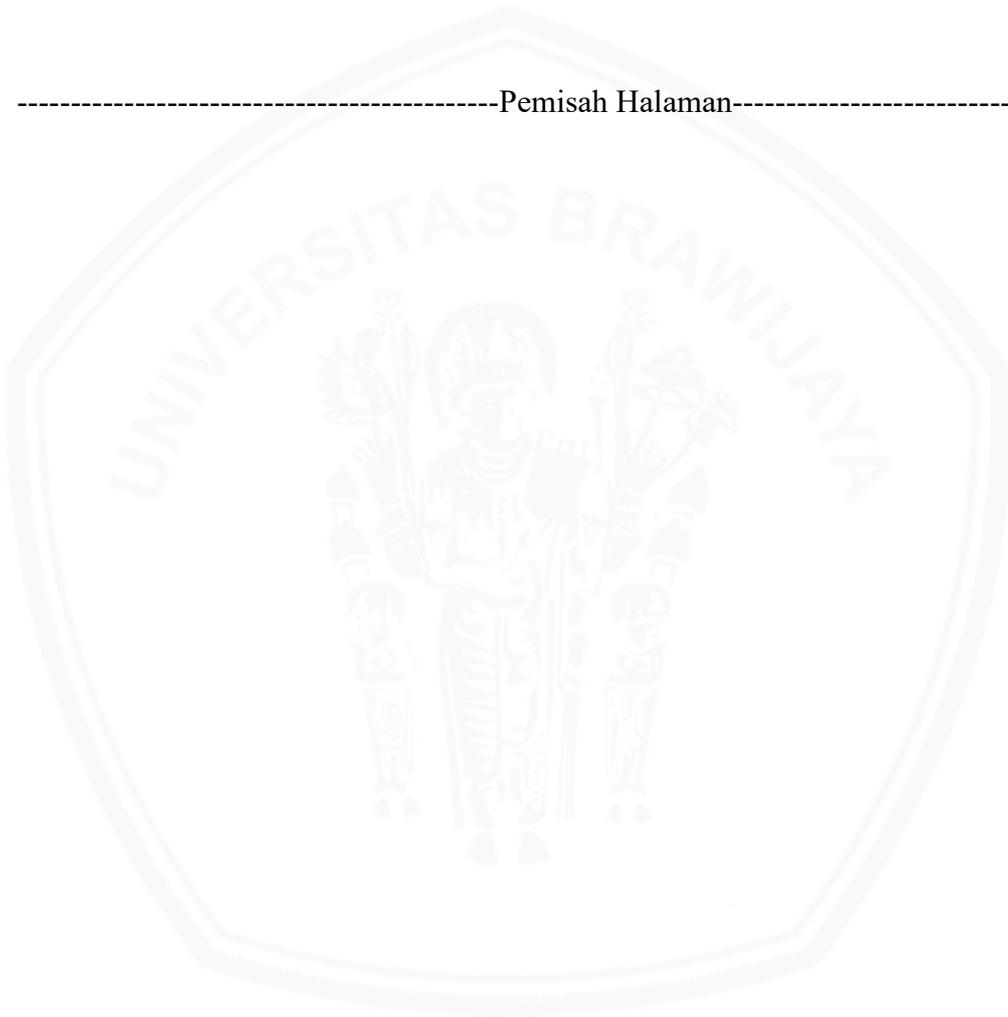
DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.1	Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Di Indonesia 2011-2017	4
2.1	Model Implementasi Kebijakan Publik Donald Van Metter dan Carll Van Horn.....	26
2.2	Model Implementasi Kebijakan Publik Mazmanian dan Paul Sabatier	32
2.3	Model Implementasi Kebijakan Publik George C. Edward III	35
2.4	Model Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Gridle	39
2.5	Model Kesesuaian Korten.....	44
3.1	Komponen Analisis Data Model Interaktif.....	74
4.1	Peta Kota Batu	79
4.2	Logo Dinas Sosial Kota Batu	85
4.3	Bagan Struktur Dinas Sosial Kota Batu.....	88
4.4	Mesin Electronic Data Capture.....	95
4.5	Papan Nama E-Warung Desa Beji.....	96
4.6	Pelaksanaan Kegiatan E-Warung	97
4.7	Kartu Keluarga Sejahtera	98
4.8	Pertemuan Rutin Anggota Pengelola E-Warung	105
4.9	Pengepakan Barang oleh Pengelola E-Warung	106
4.10	Buku pendapatan dan pengeluaran E-Warung	107
4.11	Wawancara peneliti dengan Ibu Sri Wahyuni	109
4.12	Struktur Organisasi E-Warung	114
4.13	Sosialisasi oleh Dinas Sosial	130
4.14	Survey lokasi E-Warung oleh Dinas Sosial.....	133

DAFTAR LAMPIRAN

Judul	Halaman
Lampiran 1	166
Lampiran 2	170
Lampiran 3	171

-----Pemisah Halaman-----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2016 total jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 257.912.349 jiwa. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai macam masalah salah satunya adalah terkait dengan kemiskinan. Menurut Todaro (2004), kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang, yang tidak mampu menyelenggarakan sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Masalah yang kompleks ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, dan lingkungan. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan terjadi dikarenakan kemampuan masyarakat pelaku ekonomi tidak sama, sehingga terdapat masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam proses pembangunan atau menikmati hasil-hasil pembangunan.

Kemiskinan merupakan masalah yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk dalam hal pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan seringkali dipahami

dalam pengertian yang sangat sederhana yaitu sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup sehari-hari. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri bagi setiap orang merupakan suatu masalah serius, khususnya bagi orang dewasa secara jasmani dan rohani (Siagian, 2011:137).

Menurut Baswir (1999:12), menyatakan ada tiga konsep kemiskinan yaitu kemiskinan natural, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan alamiah, baik pada segi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya. Kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya melakukan perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karena masyarakat miskin berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri dari perangkap kemiskinan.

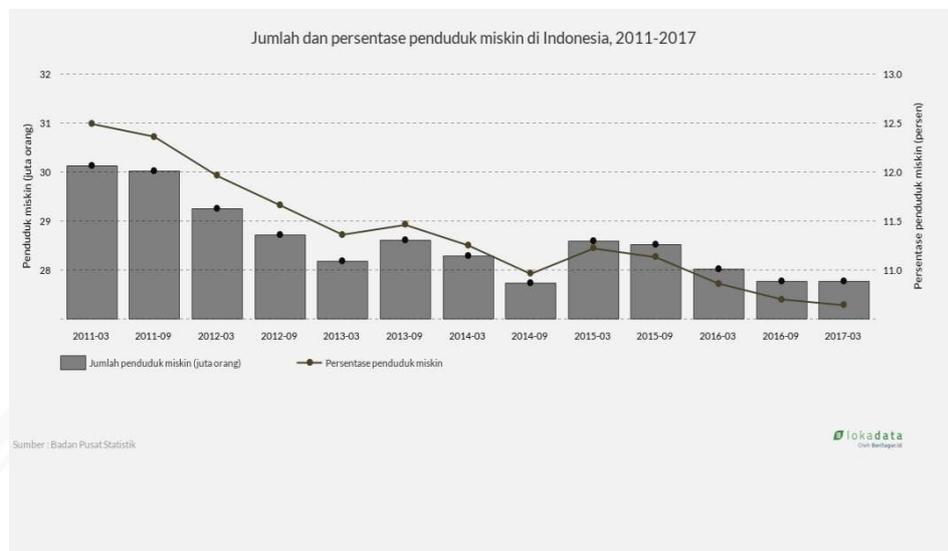
Menurut Sarasutha dan Noor dalam Supadi dan Achmad Rozany (2008), kemiskinan secara konseptual dibedakan menjadi kemiskinan

relatif dan kemiskinan absolut dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan.

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, negara yang memiliki sejarah kurang baik dalam memandang dan mengurus kemiskinan. Menurut Hermanto (2017:17), sebagai negara berkembang, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan masyarakat tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus imigrasi ke kota dan kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Indonesia sebagai sebuah negara berkembang masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Melihat lebih jauh kondisi kemiskinan yang terjadi di

Indonesia dapat dilihat dari tampilan grafik perkembangan jumlah dan presentase penduduk miskin di Indonesia.



Gambar 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia tahun 2011-2017

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Perkembangan jumlah dan presentase penduduk miskin di Indonesia periode 2011-2017 mengalami naik turun dari tahun ke tahun. Berdasarkan grafik diatas jumlah penduduk miskin terbanyak berada pada Maret tahun 2011 yaitu sebanyak 30,12 Juta orang (12,49 persen dari jumlah total penduduk). Maret 2013 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu 1,95 Juta jiwa. Berdasarkan data BPS kenaikan penduduk miskin terjadi pada September 2013 dan Maret 2015 karena pada periode tersebut terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok dan harga bahan bakar minyak. Maret 2017 jumlah penduduk miskin, yakni penduduk dengan pengeluaran dan pendapatan kapita per bulan di

bawah garis kemiskinan, di Indonesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk). Angka tersebut berkurang 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 27,76 juta orang (10,70 persen). Secara persentase angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, namun secara jumlah angka tersebut mengalami kenaikan. Kenyataan yang terjadi di Indonesia masih banyak warga yang menjadi pengemis, gelandangan, dan bahkan masalah kriminal dan kekerasan yang terjadi juga dicurigai karena faktor kemiskinan. Disimpulkan dengan adanya permasalahan kemiskinan ini perlu adanya penanggulangan kemiskinan.

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan bantuan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganan selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Diperlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan adalah kewajiban pemerintah yang harus dilakukan sebagai wujud dari amanat konstitusi bagi pencapaian tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa, Negara Indonesia melindungi segenap Bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan ikut mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah melakukan berbagai macam cara untuk mengatasi kemiskinan, salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau miskin yang disebut sebagai bantuan sosial (bansos), bantuan sosial ini dalam bentuk tunai maupun non tunai.

Pemerintah berusaha memberikan perhatian dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menangani kemiskinan. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tercatat dalam Bab 1 (Pasal 1) perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab 1 (Pasal 1).

Pada Bulan April tahun 2016 Presiden Jokowi memberikan arahan kepada jajaran menteri tentang pentingnya mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, diharapkan penyaluran semua bantuan sosial dan subsidi secara non tunai dengan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol dan pemantauan, serta mengurangi penyimpangan (Buku Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai, 2016:8).

Melalui arahan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) menghasilkan suatu kebijakan sosial yaitu program E-Warung . Program E-Warung istilah yang digunakan dalam program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), sebagai tempat pembelian bahan pangan penerima bantuan program BPNT (Buku Pedoman BPNT, 2016:4). Tujuan utama program E-Warung adalah memberdayakan masyarakat miskin supaya lebih sejahtera sehingga dapat membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan akses keluarga miskin ke pelayanan keuangan inklusif serta menghilangkan penyalahgunaan bantuan.

Program E-Warung tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Pasal 6 menyebutkan, bahwa Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut E-Warung KUBE PKH adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE Jasa sebagai sarana pencairan Bantuan Sosial berupa bahan pangan pokok dan/atau uang tunai secara elektronik, kebutuhan usaha, serta pemasaran hasil produksi anggota KUBE.

Menurut Kementerian Sosial (2016 : 4-5) program E-Warung ini dapat dijadikan media dalam pemberdayaan masyarakat miskin dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan sasaran yang efektif bagi masyarakat miskin untuk mengatasi berbagai keterbatasan seperti kepemilikan modal, informasi, teknologi dan lainnya secara Bersama-sama dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan sosial hidupnya.
- b. Melalui program E-Warung ini dapat menumbuh kembangkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, kepedulian dan kesetiakawanan sosial diantara para pengelola E-Warung.
- c. Melalui program E-Warung ini memudahkan bagi para pihak yang memberdayakan mereka dalam pelaksanaan pembinaan maupun monitoring, dengan demikian pelaksanaannya akan lebih efektif dan efisien baik dari segi pemberdayaan, tenaga dan waktu yang digunakan.

Program E-Warung mulai dilaksanakan pada tahun 2016 dan per 14 Agustus 2017, Kemensos telah berhasil meresmikan 7.733 unit E-Warung di 45 kota dan kabupaten. Di Indonesia sebagian besar daerah telah didirikan E-Warung salah satunya adalah di Kota Batu.

Menurut pegawai Dinas Sosial Kota Batu (2017), menyebutkan ada beberapa faktor kemiskinan yang menjadi penghambat masyarakat Kota Batu untuk sejahtera diantaranya adalah, faktor kemiskinan dikarenakan penciptaan sistem, dimana kemiskinan ini terjadi karena jenjang status struktural kemiskinan dikarenakan objek mata pencaharian

terhambat. Faktor ini lebih banyak dijumpai pada daerah kemiskinan di wilayah perdesaan sebagian masyarakat bermata pencaharian buruh tani dan di perkotaan sebagai buruh-buruh kasar dengan upah sekedarnya. Faktor kedua kemiskinan dikarenakan penciptaan kondisi alam yang tidak mendukung atau sumber daya alam kurang potensial disektor pertanian dan sektor lainnya, maka peluang dalam bekerja terhambat dikarenakan faktor sumber daya alam. Dari dua faktor tersebut, maka kemiskinan di Kota Batu dominan berada pada kemiskinan struktural, dan perlu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan Buku Pedoman Bantuan Pangan Non Tunai (2016), program E-Warung dikelola langsung oleh Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS), KMIS beranggotakan para peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Para penerima bantuan sosial adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM diberikan kartu keluarga sejahtera yang diterbitkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Nasional Indonesia (BNI). Setiap bulan para KPM akan menerima bantuan sosial non tunai sejumlah 110.000 ribu rupiah. Uang yang ada di Kartu Keluarga Sejahtera dapat dibelanjakan di E-Warung, melalui cara inilah penyimpangan penggunaan bantuan sosial dapat dihindarkan.

Menurut Tim Kemensos (2016), program E-Warung adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Angka kemiskinan Kota Batu menurut Dinas Sosial Kota Batu pada tahun 2016 mencapai 2.339 Keluarga. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Batu (2017), di tahun 2017 jumlah

E-Warung di Kota Batu mencapai 6 E-Warung, yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada Kota Batu. Dalam pelaksanaan program E-Warung ditemukan banyak masalah yang terjadi yaitu mengenai belum adanya pedoman khusus, petunjuk teknis, dan sistem monitoring evaluasi yang menjadi acuan bersama. Sebagai implikasi, pemahaman dan pelaksanaan teknis E-Warung dilapangan bervariasi. Selain itu juga dalam pelaksanaan program E-Warung terdapat permasalahan yaitu masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang mengelola E-Warung. Menurut Pegawai Dinas Sosial (2017), Pendirian E-Warung juga terkendala oleh akses atau keterjangkauan E-Warung oleh para KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Didalam Peraturan Menteri Sosial Nomer 8 Tahun 2017 disebutkan bahwa E-Warung didirikan di salah satu rumah anggota PKH (Program Keluarga Harapan), namun diketahui bahwa para anggota PKH memiliki rumah yang berada di perkampungan dan hampir tidak ditemukan yang memiliki rumah di pinggir jalan raya. Pada dasarnya kendala yang dihadapi ini akan mempengaruhi pelaksanaan program E-Warung ini, sehingga pemberdayaan masyarakat miskin yang dilakukan belum dapat terselesaikan secara optimal.

Berkaitan dengan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang **“Implementasi Program E-Warung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Dinas Sosial Kota Batu)”**. Alasan dilakukan penelitian di Kota Batu adalah bahwa Kota Batu tidak luput dari

permasalahan sosial ekonomi yang menjadi faktor penghambat dalam proses pengembangan pembangunan ekonomi. Permasalahan tersebut adalah kondisi kemiskinan yang perlu untuk dikendalikan guna terwujudnya kesejahteraan penduduk secara menyeluruh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program E-Warung dalam pemberdayaan masyarakat miskin?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan penghambat implementasi program E-Warung dalam pemberdayaan masyarakat miskin?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program E-Warung dalam memberdayakan masyarakat miskin.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program E-Warung dalam memberdayakan masyarakat miskin.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi Penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu administrasi publik.
- b. Hasil penelitian juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi perbandingan untuk penelitian selanjutnya agar menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang program E-Warung .

2. Kontribusi Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan mengenai pentingnya peranan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dalam melakukan program E-Warung dalam pemberdayaan masyarakat miskin.
- b. Bagi peneliti pribadi, penelitian ini sebagai sarana memperdalam ilmu dan pengetahuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan terutama yang berkaitan dengan topik implementasi kebijakan dan pelayanan publik. Selain itu, juga untuk memperluas serta memperdalam wawasan dan meningkatkan daya tanggap terhadap situasi yang ada di lapangan yang nantinya akan ditemui di kehidupan sehari-hari.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri atas tiga bab yang merupakan bagian dari satu rangkaian dan memiliki keterkaitan. Sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian yang berjudul Implementasi Program E-Warung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin , selain itu berisi tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang beberapa teori yang mendukung serta mempermudah pembahasan terhadap permasalahan yang ada. Teori dalam bab ini antara lain Kebijakan Publik, Program E-Warung , dan Kemiskinan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, yang terdiri dari jenis penelitian jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, sumber data, pengumpulan data, instrumen penelitian, metode analisis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti awali dengan menjelaskan Penyajian Data. Untuk memperjelas hal ini maka dalam pembahasan mencantumkan tentang implementasi program E-Warung dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Kemudian di akhir pembahasan bab ini peneliti menunjukkan analisis dan interpretasi hasil temuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran- saran. Kesimpulan sebagai jawaban atau hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Sedangkan saran merupakan pendapat ilmiah tambahan dari penulis mengenai hal-hal ideal atau kongkrit yang telah atau dapat ditempuh untuk melengkapi penelitian-penelitian selanjutnya, sehingga penelitian ini dapat menjadi karya penelitian yang bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pengkajian terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, dilakukan untuk mempertajam analisis dan sebagai bahan perbandingan dalam pelaksanaan penelitian. Berikut merupakan ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul dan penulis	Jenis Penelitian	Hasil	Perbedaan
1	Elni Sumiarti (2008) Wirausaha Rumah Tangga Untuk Mengatasi Kemiskinan.	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah wirausaha rumah tangga atau <i>home industry</i> dapat mengurangi kemiskinan yang ada di suatu daerah. Melalui usaha <i>home industry</i> akan membuka sektor lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga kemiskinan di daerah tersebut dapat diatasi.	Fokus penelitian ini adalah pengentasan kemiskinan dengan wirausaha rumah tangga. Sedangkan fokus dari skripsi ini adalah pemberdayaan masyarakat miskin dengan program E-Warung.
2	Sujianto (2012)	Kualitatif	Penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Baru Provinsi Riau. Hasil dari	Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti

No	Judul dan penulis	Jenis Penelitian	Hasil	Perbedaan
	Implementasi Program Raskin Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		penelitian ini adalah implementasi program raskin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dinyatakan kurang berhasil. Implementor atau pelaksana kurang memahami tugas dan tanggung jawab dalam proses penyaluran. Diperlukan peningkatan pelatihan, pengembangan serta evaluasi kinerja pelaksana kebijakan.	peneliti skripsi adalah programnya. Penelitian ini meneliti implementasi program raskin sedangkan peneliti skripsi meneliti implementasi program E-Warung.
3	Maman Suherman (2014) Peranan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Jawa Barat	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah peran dunia usaha cukup strategis dalam membantu pemerintah dalam menggerakkan, bahkan mempercepat laju roda perekonomian daerah. Sehingga pada gilirannya akan memberikan kontribusi terhadap	Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti peneliti skripsi adalah programnya. Penelitian ini meneliti peranan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam menurunkan angka

No	Judul dan penulis	Jenis Penelitian	Hasil	Perbedaan
			peningkatan indeks daya beli karena berkurangnya angka penganggur. Aspek kelemahan yang dirasakan adalah tidak adanya kontrol terhadap usaha mitra binaan, sehingga sulit melihat perkembangan usahanya.	kemiskinan, sedangkan peneliti skripsi meneliti implementasi program E-Warung dalam pemberdayaan masyarakat miskin.
4	Iwan Hermawan (2012) Analisis Eksistensi Sektor Pertanian terhadap Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini adalah Sektor pertanian berperan penting terhadap upaya pengurangan kemiskinan di wilayah perdesaan dibandingkan wilayah perkotaan. Sedangkan di wilayah perkotaan, industri pengolahan berperan penting dalam upaya mengurangi kemiskinan.	Fokus penelitian ini adalah pengurangan kemiskinan melalui sektor pertanian. Sedangkan fokus dari skripsi ini adalah pemberdayaan masyarakat miskin dengan program E-Warung.
5	Khodziah Isnaini Kholif (2014)	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Program Keluarga	Perbedaan penelitian ini dengan apa yang akan diteliti peneliti

No	Judul dan penulis	Jenis Penelitian	Hasil	Perbedaan
	Implementasi Program Keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di kecamatan Dawarblandong kabupaten Mojokerto		Harapan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Adanya pelanggaran pendamping yang mempunyai pekerjaan lain (double job).	skripsi adalah programnya. Penelitian ini meneliti implementasi program Keluarga Harapan (PKH) sedangkan peneliti skripsi meneliti implementasi program E-Warung.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian *policy* (kebijakan) menurut Wahab (2008:6) sering kali saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, perundang-undangan, ketentuan-ketentuan, usulan dan rancangan-rancangan besar. Menurut James E. Anderson dalam Wahab (2008:8) merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan mengacu pada suatu jenis tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu, yang lebih kurang bersinambungan sepanjang waktu, dan diharapkan untuk menjaga terpeliharanya keadaan tertentu dan biasanya dimaksudkan untuk memenuhi tujuan-tujuan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam pernyataan kebijakan. Penjelasan ini

sekaligus menegaskan bahwa kebijakan itu adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu. Istilah kebijakan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah.

Dye mendefinisikan bahwa “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan” (Winarno, 2007:17). Sejalan dengan definisi tersebut, Peterson juga memberikan pendapat terhadap definisi kebijakan publik dengan mengemukakan bahwa “Kebijakan publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana” (Keban, 2008:61).

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah dipaparkan maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penekanan kebijakan publik terletak pada pemerintah. Hal tersebut lantaran pemerintah sebagai aktor yang berperan penting dalam memutuskan terhadap apa yang harus dipilih dan di implementasikan untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Dampak Kebijakan Publik

Dampak kebijakan merupakan salah satu dari lingkup kajian studi analisis kebijakan publik. Analisis publik menurut Thomas R. Dye (dalam Abdul Wahab. 2005:7) adalah suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh instansi, mengapa mereka melakukan itu, apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda.

Dampak kebijakan merupakan komponen dalam penilaian kebijakan dan bukan penelitian kebijakan banyak dilakukan untuk mengetahui dampak dari suatu kebijakan yang akan diperoleh, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Dampak kebijakan juga dibedakan antara *Policy Impact/Outcomes* dan *Policy Output*. *Policy Outcomes* adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilakukannya suatu kebijakan. *Policy Output* adalah apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dari pengertian ini, maka dampak mengacu pada perubahan yang diakibatkan oleh suatu implementasi kebijakan (Abdul Wahab. 2005:62).

Mengenai persoalan keselarasan dampak kebijakan dengan tujuan-tujuan resmi yang telah digariskan dalam peraturan, masih ada dua aspek lain dari tahap proses implementasi yaitu *pertama*, implementasi suatu undang-undang, karena perubahan-perubahan kondisi sosial, ekonomi dan teknologi menimbulkan dampak yang berbeda dengan apa yang digariskan dalam tujuan. *Kedua*, berkenaan dengan dampak perubahan-perubahan jangka panjang dalam kekuatan politik dari kepentingan-kepentingan yang selama ini bersaing.

Dalam pembuatan kebijakan harus ada dasar yang digunakan oleh pembuatan kebijakan. Berkaitan dengan ini Anderson (dalam Abdul Wahab 2005:27) yang mengemukakan nilai-nilai yang kemungkinan menjadi pedoman para pembuat keputusan, yaitu:

1. Nilai-nilai politik

2. Nilai-nilai organisasi
3. Nilai-nilai pribadi
4. Nilai-nilai kebijakan dan nilai-nilai ideologis.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kebijakan publik hampir selalu terdapat 3 komponen dasar yaitu: 1) Tujuan yang luas, 2) Sasaran yang spesifik, 3) Cara mencapai sasaran tersebut.

Komponen yang terakhir disebut yaitu cara yang berfungsi untuk mewujudkan dua komponen sebelumnya biasa disebut sebagai implementasi.

3. Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur berjalannya pemerintahan dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh masyarakat, serta hal-hal penunjang berjalannya suatu negara untuk mencapai kepentingan bersama. Kemudian menurut Nugroho (2011:110-111) kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama, tujuan kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau *risoris* yaitu antar kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya oleh pemerintah adalah untuk mengatur kehidupan bersama terutama untuk kepentingan masyarakat, pemerintah memiliki otoritas atau wewenang untuk mengalokasikan nilai-nilai. Pada hal ini yang dimaksudkan dari nilai-nilai adalah peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat dan apabila setiap pelanggaran akan diberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, hukuman

yang diberikan akan dijatuhkan didepan masyarakat atau tidak dirahasiakan.

C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh akan tetapi dalam kenyataannya tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Implementasi merupakan suatu tahapan dimana kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Kata implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu "*implementation*" yang dalam bahasa indonesia menjadi implementasi, sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan dan penerapannya. Kamus Webster menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai saran yang mendukung sehingga nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tersebut (Wahab, 2008:67).

Menurut Joko Widodo (2007:85-86), "Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah ataupun

swasta”, sehingga dapat dikatakan inti dari implementasi adalah kegiatan untuk menyalurkan atau memberikan hasil dari suatu kebijakan agar dapat mewujudkan tujuan utama dari kebijakan tersebut. Tujuan dari kebijakan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh kelompok sasaran, sehingga dalam jangka panjang hasil dari kebijakan akan mampu diwujudkan.

2. Model - Model Implementasi Kebijakan

a. Implementasi Kebijakan Publik Model Donald Van Meter dan Carll Van Horn

Model pendekatan *top down* yang dirumuskan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn disebut dengan *A model of The Policy Implementation*. Proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau performasi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja publik (Agustino 2016:133)

Ada enam variabel, menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:

1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya ukurannya dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang berada di level kebijakan.

Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di level warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindak laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarateristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan isu kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat saja agen

pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran pertama. Cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan suatu penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambilan keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang ingin diselesaikan.

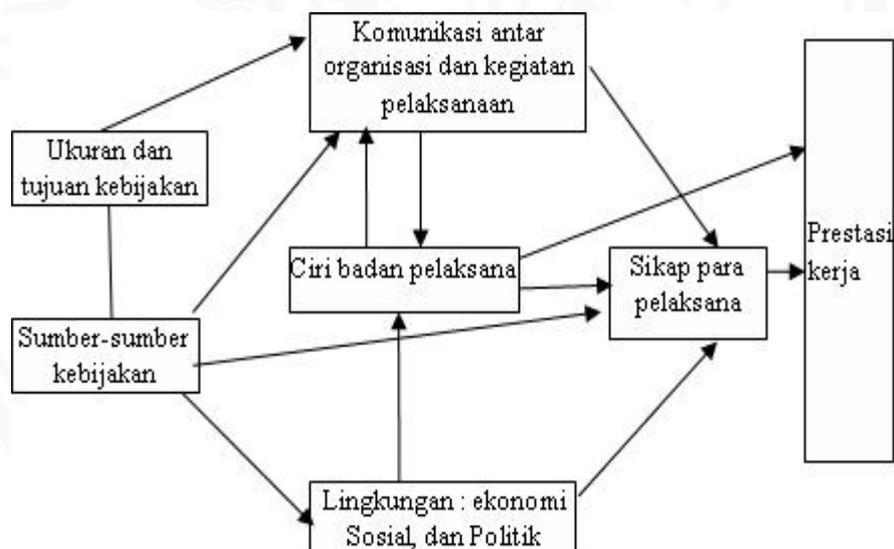
5) Komunikasi Antar-Organisasi

Kordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi, dan begitu sebaliknya.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah diterapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Publik Donald Van Metter dan Carll Van Horn



Sumber: Leo Agustino (2016:135)

b. Implementasi Kebijakan Publik Model Mazmanian dan Paul Sabatier

Implementasi kebijakan publik yang lain, ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier. Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino

(2016:136) mengungkapkan bahwa peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu :

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi :

a. Kesukaran – kesukaran teknis

Tercapainya atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk diantaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Disamping itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkan teknik-teknik tertentu.

b. Keberagaman perilaku kelompok sasaran

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan, sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (administrator atau birokrat) dilapangan.

c. Persentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), maka

semakin besar peluang untuk memobilisasikan dukungan politik terhadap suatu kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan.

d. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar/sulit para pelaksana memperoleh implementasi yang berhasil. Artinya ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat dikendalikan bila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah besar.

2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Cepat, meliputi:

a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai.

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala, prioritas dan urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa *output* kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut.

b. Digunakannya teori kausal yang memadai

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

c. Ketepatan alokasi sumber dana

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

d. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundang-undangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga alpa dilaksanakan, maka koordinasi antar instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

e. Aturan-aturan keputusan dari badan-badan pelaksana

Memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memperkecil jumlah dan intensif memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

f. Rekrutmen pejabat pelaksana

Para pejabat pelaksana memiliki kesepakatan yang diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena *top down policy* bukanlah perkara yang mudah untuk diimplikasikan pada para pejabat pelaksana di level lokal.

g. Akses formal pihak luar

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor diluar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Hal ini dimaksudkan agar control pada para pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

3. Variabel-Variabel diluar Undang-Undang yang Mempengaruhi Implementasi.

a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi.

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Eksternal faktor menjadi hal penting untuk diperhatikan.

b. Dukungan publik.

Hakekat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan.

c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok

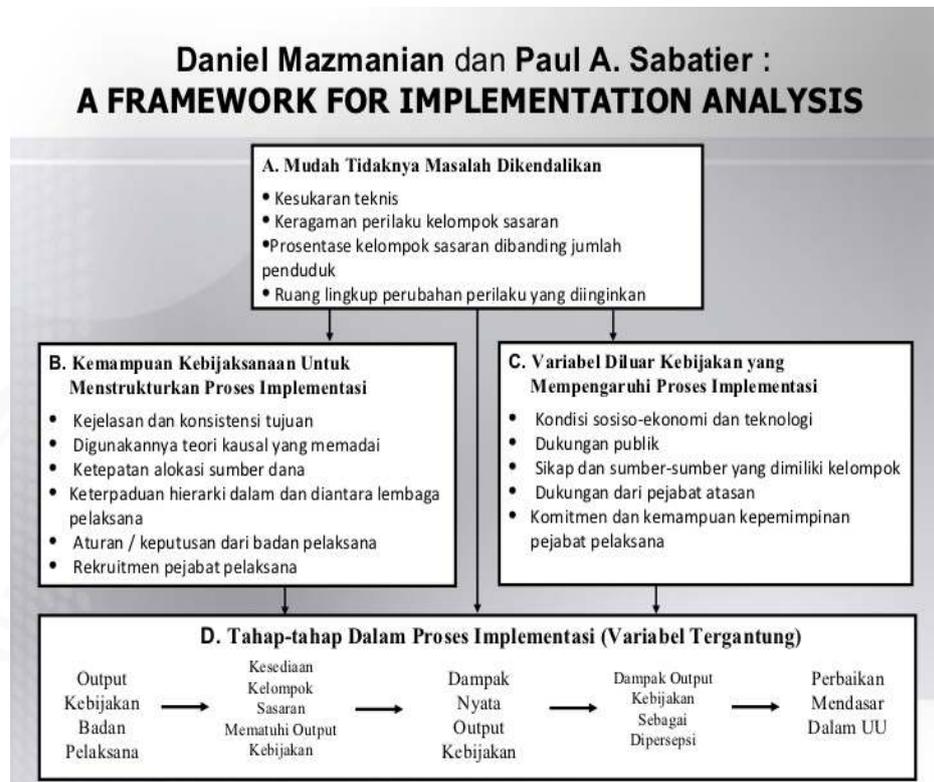
Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila ditingkat masyarakat, warga memiliki

sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam kearifan lokal yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan publik.

d. Dukungan dari pejabat Atasan

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruhnya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat. Kemampuan berinteraksi antar lembaga atau individu di dalam lembaga untuk menyukseskan implementasi kebijakan menjadi indikator penting keberhasilan kinerja kebijakan publik.

Gambar 2.2 Implementasi Kebijakan Publik Model Mazmanian dan Paul Sabatier



Sumber: Leo Agustino (2016:152)

c. Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III

Menurut George C. Edward III, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka model implementasi kebijakan publik yang berperspektif *top down* dikembangkan oleh George C. Edward III.

Pendekatan yang dikemukakan oleh Edward III mempunyai empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel dalam model yang dibangun oleh Edward III tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variabel akan sangat mempengaruhi variabel yang lain. Keempat variabel di atas dalam model yang dibangun oleh Edward III memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan. Sementara itu, model yang dikemukakan Edwards III dalam Agustino (2012:149) implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu :

A. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program atau kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan.

B. Struktur Organisasi

Menurut Edward III dalam Agustino (2016:137), menjelaskan bahwa struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi

birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangannya adalah bagaimana agar tidak terjadi *bureaucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerjasama diantara lembaga-lembaga negara atau pemerintah.

C. Disposisi atau *attitudes*

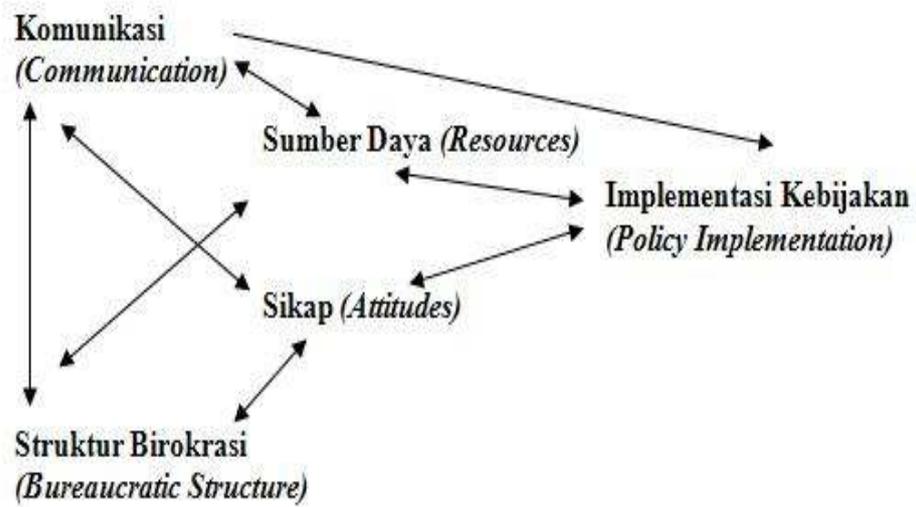
Disposisi adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementor dari program, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila *implementor* memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan atau program, sedangkan apabila implementor atau pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi atau pelaksanaan program juga menjadi tidak efektif

D. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi pelaksana atau implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Edward III dalam

Agustino (2012:152) menyatakan bahwa hal ini meliputi empat komponen, yaitu staff, informasi, wewenang dan fasilitas.

Gambar 2.3 Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III



Sumber: Leo Agustino (2016:142)

d) Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Grindle

Model keempat yang berpendekatan *top-down* dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Pendekatannya tersebut dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle atau dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu (Agustino, 2016:142):

1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakan.

2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:

- a. Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
- b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle (1980) ditentukan oleh tingkat *implementabilty* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

1. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

- a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini beragumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

- b. *Type of Benefit* (Tipe Manfaat)

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis

manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c. *Extent of Change Envisions* (Derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai usaha skala yang jelas.

d. *Site of Decision Making* (Letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan.

e. *Program Implementer* (Pelaksana Program)

Menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik.

f. *Resources Committed* (Sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat)

Suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat

guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak di implementasikan akan jauh dari apa yang diharapkan.

b. *Institution and Regime Characteristic* (Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c. *Compliance and Responsivness* (Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu kebijakan lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan yang terjadi.

Pendekatan *bottom up*, memandang implementasi dari pusat kebijakan dirumuskan oleh lembaga yang tersentralisir dari pusat. Pendekatan *bottom up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang merasakan sendiri persolan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan *bottom up* adalah model implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sistem *sosio-kultur* yang mengadakan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri.

Gambar 2.4 Implementasi Kebijakan Publik Model Merilee S. Gridle



Sumber: Leo Agustino (2016:145)

D. Program

1. Pengertian Program

Secara umum program dapat diartikan sebagai bagian dari kebijakan. Program merupakan bentuk kegiatan beserta tatacara pelaksanaannya yang akan dilaksanakan setelah memutuskan suatu kebijakan. Program sangat erat kaitannya dengan kebijakan, program juga dapat diartikan sebagai instrumen kebijakan yang berbentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan mengalokasikan sumber daya manusia maupun anggaran.

Pengertian lain juga dijelaskan oleh Mansyur (2010:4) menjelaskan program sebagai “serangkaian proyek yang terkordinasi dan berhubungan yang terus berkelanjutan dan memiliki waktu yang ditentukan untuk memulai pelaksanaannya serta waktu untuk penyelesaiannya dalam mencapai tujuan tertentu”. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa program merupakan kegiatan yang terencana dan memiliki batas waktu dalam pelaksanaannya. Definisi program menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu “merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi masyarakat”.

Pandangan lain mengenai definisi program juga dijelaskan oleh Terry dalam Tachjan (2006:31), yaitu:

“A program can be defined as a comprehensive plan that includes future use of different resources in an integrated pattern and establish a sequence of required actions and time schedule for each in order to achieve stated objective. The make up of a program can include objectives, policies, procedures, methods, standards and budgets” (suatu program dapat didefinisikan sebagai rencana yang komprehensif yang mencakup penggunaan sumber daya secara terpadu dan membangun urutan tindakan yang diperlukan jadwal pelaksanaan untuk masing-masing dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Sebuah program dapat mencakup tujuan, kebijakan, prosedur, metode, standar, dan anggaran).”

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai definisi program maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program merupakan bagian dari kebijakan berupa kegiatan yang terencana dan terkordinasi serta berkelanjutan yang dalam pelaksanaannya menggunakan jangka waktu tertentu dan mengalokasikan sumber daya sebagai pendukung untuk mencapai tujuan tertentu. Program juga merupakan kegiatan yang telah dipilih untuk dapat memecahkan masalah tertentu.

2. Implementasi Program

Implementasi adalah sebuah tindakan nyata yang dilakukan oleh aktor kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu setelah kebijakan ditetapkan. Suatu kebijakan tidak akan membawa dampak apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan. Implementasi kebijakan akan dapat dimulai setelah tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun serta dana yang akan digunakan telah dipersiapkan untuk mencapai tujuan.

Hal ini sejalan dengan pendapat Grindle dalam Tachjan (2006:31) yang mengatakan *“implementation is that set of activities directed toward*

putting out a program into effect” (implementasi adalah seperangkat kegiatan yang mengarah pada program untuk menuju akibat)”.
Selanjutnya, Wahab (2012:237) merumuskan tahap implementasi sebagai berikut:

- a. Merancang dan menyusun tujuan yang jelas, membuat program dengan perincian tugas, serta penentuan ukuran prestasi kerja, biaya, dan waktu yang jelas.
- b. Melaksanakan program yang telah dirancang dengan mengalokasikan sumber daya manusia, finansial dan pendukung lain berdasarkan prosedur dan metode yang tepat.
- c. Membuat sistem penjadwalan pelaksanaan program, monitoring, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna meminimalisir terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan pemahaman yang dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan dapat diwujudkan melalui sebuah program. Implementasi program merupakan turunan dari sebuah kebijakan. Setelah menetapkan kebijakan, maka disusunlah suatu program yang berbentuk kegiatan untuk dilaksanakan berdasarkan tujuan kebijakan. Suatu program harus terdapat sasaran dan menentukan siapa yang akan melaksanakan program tersebut. Melalui program, suatu rencana dari kebijakan akan lebih mudah dan terorganisir untuk dioperasikan. Unsur lain yang harus dipenuhi dalam implementasi program yaitu adanya keterlibatan dari masyarakat untuk melaksanakan program tersebut sehingga masyarakat dapat melihat dampak dari adanya program tersebut. Unsur pelaksana dari implementasi program juga menentukan berhasil tidaknya program tersebut. Unsur pelaksana meliputi agen pelaksana yang terlibat langsung dalam proses implementasi.

Selanjutnya, Jones dalam Suyana (2009:28) menjelaskan terdapat tiga pilar aktivitas dalam melaksanakan program yang meliputi:

- a. Pengorganisasian struktur organisasi yang jelas dalam pelaksanaan suatu program sehingga dapat membentuk tenaga pelaksana dari sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten.
- b. Interpretasi para pelaksana harus mampu menjalankan program berdasarkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana yang telah dibuat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
- c. Penerapan atau aplikasi diperlukan adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan yang ditentukan sehingga tidak terjadi benturan dengan pelaksana program lainnya.

Implementasi program juga memerlukan aktor sebagai pelaksana dari program tersebut. Dimock dalam Tachjan (2006:28) menjelaskan bahwa:

“Pelaksana adalah implementor kebijakan yang merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisi serta perumusan kebijakan, strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksana operasional, dan pengawasan serta penilaian”.

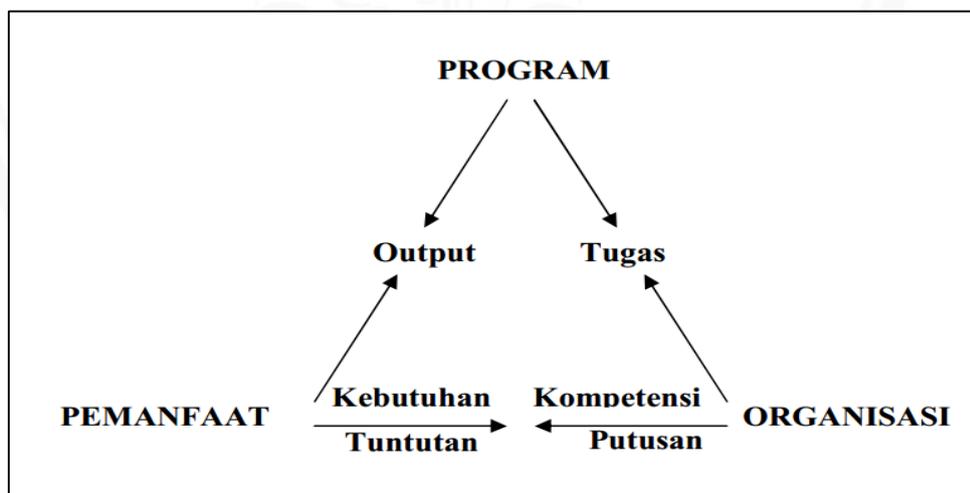
Aktor pelaksana tersebut juga dapat dimaknai sebagai stakeholder. Istilah stakeholder telah digunakan secara luas oleh lembaga-lembaga publik dalam proses pengambilan keputusan. Hadi (2011:101) mengategorikan stakeholder kedalam beberapa kelompok, yaitu:

- a. Stakeholder utama (primer) merupakan stakeholder yang memiliki kaitan penting secara langsung dalam suatu kebijakan, program, dan proyek. Stakeholder ini harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan, seperti tokoh masyarakat yang akan menjadi objek kebijakan atau program, pimpinan instansi pemerintah yang bertanggung jawab secara langsung dalam pengambilan atau implementasi program, ataupun pimpinan perusahaan yang menjadi mitra pemerintah dalam mendanai implementasi program maupun sebagai

- perumus dan pembuatan suatu program yang berkaitan dengan stakeholder disekitar perusahaan.
- b. Stakeholder pendukung (sekunder) yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan maupun program, namun memiliki kepedulian dan perhatian lebih terhadap suatu permasalahan tertentu sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah.
 - c. Stakeholder kunci adalah stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sebagai tingkatannya, legislatif, dan instansi yang memiliki kewenangan untuk menjalankan program.

Salah satu model implementasi program yang dikemukakan oleh David C.Korten, yaitu model kesesuaian implementasi program. Model ini menggunakan pendekatan proses pembelajaran. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.5 Model Kesesuaian Korten



Sumber: *Haedar Akib dan Antonius Tarigan (2000: 12)*

Model Kesesuaian Implementasi Program Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu

- a. Program itu sendiri
- b. Pelaksanaan program
- c. Kelompok sasaran program

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. (Akib dan Tarigan, 2000: 12).

- a. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
- b. Kedua, berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
- c. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan apabila tidak ada kesesuaian antara ketiga unsur tersebut. Hal ini disebabkan apabila *output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat. Jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program. Kesesuaian antara

tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

E. Pemberdayaan Masyarakat

1. Defenisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai proses dari pembangunan masyarakat atau individu yang ada pada kelompok tertentu dengan mempunyai tujuan untuk memperbaiki individu yang ada pada kelompok tertentu dengan mempunyai tujuan untuk memperbaiki kondisi yang ada menjadi lebih baik. Pemberdayaan dalam hal ini juga memerlukan partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan karena digunakan dalam memenuhi tujuan yang akan dicapai dengan adanya pemberdayaan. Sementara menurut Priyono dan Pranaka dalam Kementerian Sosial (2016 : 17) menyatakan bahwa:

“Inti pemberdayaan adalah meningkatkan otonomi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan seseorang yang dilandaskan pada sumberdaya pribadi, partisipasi langsung, prinsip-prinsip demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung melalui pemberian kekuatan dan kemampuan (*power and ability*)”.

Selanjutnya pemberdayaan masyarakat dapat juga disebut dengan peningkatan kemampuan ataupun ketrampilan yang dimiliki oleh

masyarakat, yang dapat mewujudkan ataupun pengembangan kualitas diri dari setiap individu dalam masyarakat. Sementara menurut Chamber dalam Kementerian Sosial (2016 : 2) menyatakan bahwa: Tingkat keberhasilan pemberdayaan akan ditentukan oleh sejauh mana upaya tersebut sensitif terhadap dan mampu mendayagunakan nilai-nilai potensi lokal, baik berupa pengetahuan lokal maupun institusi sosial.

Pemberdayaan umumnya berkaitan dengan kondisi sesuatu atau seseorang yang perlu diberikan kekuatan melalui berbagai upaya, sehingga dapat melakukan pekerjaan tersebut. Menurut Kementerian Sosial (2016 : 1) menyatakan bahwa, pemberdayaan erat kaitannya dengan kondisi ketidakberdayaan, kerawanan, kelemahan fisik, kemiskinan itu sendiri dan keterisolasian dari individu, keluarga dan masyarakat. Mengatasi permasalahan yang ada dilakukan upaya dengan memberikan kemampuan agar mengatasi dan mengubah kondisi.

Upaya yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah melalui perumusan kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan yang ditunjukkan bagi kelompok masyarakat yang rentan, miskin, terisolasi dan memiliki kelemahan lainnya. Agar program dan kegiatan pemberdayaan tersebut dapat dilaksanakan oleh masyarakat, maka program tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter masyarakat yang berbeda. Menurut Soegijono dalam Surjono (2008 : 26) menyatakan bahwa terdapat tiga pendekatan dalam pemberdayaan

masyarakat miskin yaitu (1) Pendekatan terarah artinya pemberdayaan harus terarah dan berpihak kepada orang miskin, (2) pendekatan kelompok artinya secara bersama-sama untuk memudahkan pemecahan masalah yang dihadapi dan (3) pendekatan pendampingan artinya selama proses pembentukan dan penyelenggaraan kelompok masyarakat miskin perlu didampingi oleh pendampingan yang profesional sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator terhadap kelompok untuk mempercepat tercapainya kemandirian.

Selanjutnya dalam pemberdayaan masyarakat setidaknya ada dua macam perspektif yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang ada terutama dalam kelompok miskin yaitu, perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada alokasi sumberdaya, dan perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada penampilan kelembagaan (Usman 2012 : 23).

Menurut Wahyono dalam Surjono (2008 : 25) menyatakan bahwa pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri *self-reliant-comunities* sebagai suatu sistem yang mengorganisasikan diri mereka sendiri. Pendekatan yang ada dalam pemberdayaan masyarakat sendiri memberikan peran dari individu sebagai pelaku atau aktor bukan sebagai objek dalam pemberdayaan masyarakatnya.

2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Prasajo dan Surjono (2008 : 27) menyatakan bahwa terdapat empat strategi yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat yaitu sebagai berikut (1) memberdayakan masyarakat dengan melakukan sosialisasi yang mana masyarakat berperan sebagai subjek, (2) mendayagunakan mekanisme penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat secara lebih aspiratif/ demokratis, (3) mobilisasi sumberdaya manusia seperti tenaga, pikiran, dan kemampuan sesuai profesionalismenya dan (4) memaksimalkan peran pemerintah mengatur agar penyelenggaraan pembangunan atau pemberdayaan masyarakat berjalan dengan lancar.

Selain itu dalam strategi pemberdayaan masyarakat menepatkan partisipasi dari masyarakat menjadi komponen yang terpenting dalam proses pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemberdayaan dalam hal ini dapat sebagai strategi aktif untuk meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi sosial. Selanjutnya melalui partisipasi juga, pembangunan dapat menjangkau masyarakat dari golongan paling bawah melalui upayan membangkitkan semangat hidup dalam membantu dirinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat terutama pada masyarakat kelas sosial atau golongan bawah yang biasa disebut masyarakat miskin, ada beberapa upaya strategis yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Menurut Sumodiningrat dalam Indrajit (2014 : 4) ada empat strategi pendekatan ialah sebagai berikut:

1. Modal Usaha

Merupakan memberdayakan ekonomi masyarakat, caranya dengan mengembangkan mekanisme penyaluran dana bantuan dan kredit lunak langsung kepada masyarakat untuk mengembangkan kegiatan sosial ekonomi produktif unggulan sehingga dapat menjamin surplus untuk tabungan dan akumulasi modal masyarakat.

2. Sumber daya manusia

Dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia, hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan manajemen dan organisasi pendamping dan kelompok masyarakat miskin guna meningkatkan produktivitas dan daya saing yang dilakukan dengan pelatihan, penyuluhan ataupun pendampingan.

3. Sarana dan prasarana

Dapat dilakukan dengan mengembangkan sarana dan prasarana serta jaringan pemasaran sehingga masyarakat miskin mudah mendapat output produksi dengan menjual ke pasar lokal ataupun regional melalui kemitraan dengan dunia usaha atau penyedia jasa pendukung lainnya.

4. Penguatan kelembagaan dan pengembangan teknologi

Dilakukan dengan upaya meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat agar proses alih informasi dan teknologi, penyaluran dan investasi, proses produksi, distribusi dan pemasaran serta

administrasi pembangunan terlembaga dengan baik sesuai dengan kondisi lokal.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan tata cara kegiatan yang dilaksanakan supaya masyarakat dapat meningkatkan kemampuan atau potensi yang dimiliki pada masing-masing individu. Dalam pemberdayaan masyarakat sendiri mempunyai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses pemberdayaan. Menurut Notoatmodjo (1997 : 11-13) faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat ialah sebagai berikut:

1. Misi dan tujuan organisasi

Setiap organisasi mempunyai misi dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan perencanaan yang baik, serta implementasi perencanaan secara tepat. Pencapaian tujuan diperlukan kemampuan yang hanya dapat dicapai dengan pengembangan masyarakat.

2. Strategi pencapaian tujuan

Misi dan tujuan organisasi mungkin mempunyai strategi yang berbeda. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan anggota dalam memperkirakan dan mengantisipasi keadaan diluar yang mempunyai dampak terhadap organisasi. Sehingga strategi yang disusun dapat diperhitungkan dampak yang akan terjadi.

3. Sifat dan jenis kegiatan

Sifat dan jenis kegiatan sangat penting pengaruhnya terhadap pengembangan sumber daya manusia dalam kelompok masyarakat yang bersangkutan. Suatu kelompok masyarakat atau organisasi sebagian melaksanakan kegiatan teknis, maka pola pengembangan sumber daya manusia akan berbeda dengan organisasi yang melaksanakan kegiatan.

4. Jenis teknologi yang digunakan

Hal yang perlu diperhatikan oleh organisasi dalam pengembangan sumber daya manusia untuk mempersiapkan tenaga guna untuk mengoperasionalkan teknologi atau otomatisasi kegiatan yang dilakukan.

2. Faktor Eksternal

Pemberdayaan selain mempunyai faktor internal juga mempunyai faktor eksternal yang lain. Faktor eksternal dalam pemberdayaan dapat dibagi menjadi berikut:

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah baik yang dikeluarkan melalui undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan menteri dan sebagainya adalah arahan yang harus diperhitungkan oleh organisasi. Kebijakan tersebut sudah pasti akan berpengaruh terhadap sumber daya alam dalam organisasi yang bersangkutan.

2. Sosial-Budaya Masyarakat
3. Faktor sosial budaya masyarakat tidak dapat diabaikan oleh organisasi apapun yang didirikan yaitu untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang sosial-budaya yang berbeda-beda,
4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Perkembangan IPTEK dewasa ini berkembang sedemikian pesatnya. Organisasi yang baik harus dapat mengikuti perkembangan tersebut, oleh karena itu organisasi harus mampu memilih teknologi yang tepat serta kemampuan anggota harus diadaptasi dengan kondisi tersebut.

F. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup (Nugroho:1995).

Pada prinsipnya, standar hidup disuatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan hidup akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat disuatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati. 2005:4).

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati. 2005:4).

Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapat antar daerah (Sofyan, 2006:22). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengidentifikasi segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut kemiskinan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan, resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun menurut Suryawati, (2005:2) keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah:

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan.

Bentuk kemiskinan absolut ini paling banya dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada orang lain.

3) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena adanya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang

mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur deskriminatif.

Bentuk Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama dikalangan negara-negara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya.

Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya menurut Suryawati, (2005:8) adalah:

1) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

2) Kemiskinan Buatan

Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh system modernisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana,

dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik dilingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan (Suryawati, 2005:23). Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

- 1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai.
- 2) Tingkat pendidikan yang relatif rendah.
- 3) Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur.

- 4) Berada di kawasan perdesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan.
- 5) Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Dapat disimpulkan bahwa dengan melihat ciri-ciri kemiskinan diatas dapat dinyatakan bahwa tidak ada patokan yang bersifat absolut untuk dijadikan kebenaran universal dalam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya kemiskinan. Sifat-sifat kemiskinan di atas hanya sebagai temuan lapangan yang paling banyak diidentifikasi.

G. Program E-Warung

1. Pengertian Program E- Warung

Program e-warung adalah bantuan pangan sosial dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-warung yang bekerja sama dengan bank (Buku Pedoman BPNT, 2016:3).

Program e-warung merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan. Program e-warung merupakan pengalihan bantuan sosial tunai ke bantuan nontunai

berbasis digital. Untuk melaksanakan program e-warung, Kementerian Sosial (Kemensos) menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, yakni bank pelaksana (BNI/BRI), Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) (Buku Kajian Awal E-warung 2017:10).

2. Tujuan Program E- Warung

Tujuan umum pelaksanaan program e-warung adalah untuk meningkatkan ketepatan kelompok sasaran penerima bantuan serta meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi penerima manfaat.

Adapun secara khusus, tujuan dari pelaksanaan program e-warung (Buku Kajian Awal E-Warung 2017:5) terdiri dari :

- a. Program e-warung memberdayakan masyarakat kurang mampu supaya lebih sejahtera sehingga dapat membantu menurunkan angka kemiskinan.
- b. Program e-warung meningkatkan akses keluarga miskin ke pelayanan keuangan inklusif dan menghilangkan penyalahgunaan bantuan.
- c. Program e-warung merupakan bagian dari upaya membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam upaya pengentasan masyarakat miskin.
- d. Penerima bansos bisa menerima bantuan sesuai dengan jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran, serta secara bertahap bansos bisa diintegrasikan dalam format nontunai. Harga sembako di

e-warung kemungkinan lebih rendah daripada harga pasar karena pasokan barangnya langsung dari distributor. KPM dapat mencairkan bantuannya kapan saja dibutuhkan dan tidak perlu mengantri lagi.

- e. E-warung sekaligus berfungsi sebagai agen bank sehingga pembinaan keluarga miskin tidak lagi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga melibatkan dunia usaha.

3. Fungsi E-Warung

Untuk mengetahui fungsi dari diterapkannya program E-Warung berdasarkan Buku Kajian Awal E-Warung (2017:11) adalah sebagai berikut:

- 1. Tempat menjual bahan pangan murah berkualitas dan kebutuhan pokok rumah tangga.**

E- Warung menjual bahan pangan murah berkualitas yang disupply dari Bulog/koperasi. Hal ini, karena Kementerian Sosial telah memberikan himbauan kepada Kube Jasa, selaku pengelola e-Warung untuk menjual bahan pangan murah dan dapat dijangkau oleh seluruh peserta KPM.

- 2. Agen bank penyalur bantuan sosial nontunai.**

Kube Jasa sebagai pengelola E-Warung, akan bekerjasama dengan pihak Bank BNI untuk dapat menyediakan fasilitas-

fasilitas yang dibutuhkan dalam pencairan bantuan sosial secara non tunai. Kube Jasa tersebut, akan terdaftar sebagai Agen 46 BNI, sehingga menyediakan pelayanan pembayaran perbankan.

3. **Tempat pemasaran hasil produksi KUBE.**

E-Warung, menjadi tempat transaksi non tunai dan menyediakan bahan pangan murah serta berfungsi sebagai tempat pemasaran hasil produksi Kube. Hal ini, bertujuan untuk meningkatkan pendapat bagi Kube, sekaligus sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat.

4. **Tempat layanan koperasi simpan pinjam.**

Di E-Warung, menyediakan jasa layanan koperasi simpan pinjam, kepada peserta/masyarakat yang membutuhkan modal, sehingga memberikan kemudahan bagi peserta/masyarakat.

4. **Kepesertaan Program E- Warung**

Adapun kepesertaan yang berkaitan dengan e-warung yang terkandung dalam Buku Kajian Awal E-Warung (2017:10) adalah:

- a. Penerima Manfaat program e-warung adalah Keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. Pada tahun 2017, KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.
- b. Sumber data KPM Bantuan Pangan Non Tunai adalah Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya

disebut DT-PFM, yang merupakan hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu di tahun 2015. DT-PFM dikelola oleh Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, selanjutnya disebut Pokja Data, yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Sosial No. 284/HUK/2016 tanggal 21 September 2016. Pokja Data terdiri dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

- c. Daftar Penerima Manfaat (DPM) Bantuan Pangan Non Tunai 2017 ditetapkan oleh Menteri Sosial. KPM Bantuan Pangan Non Tunai 2017 adalah keluarga yang namanya termasuk di dalam DPM.
- d. DPM diserahkan kepada bank penyalur dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Sosial. Bank penyalur kemudian membukakan rumah rekening berdasarkan DPM. Rumah rekening akan berubah menjadi Akun Elektronik Bantuan Pangan setelah proses pendaftaran peserta selesai. Apabila KPM yang namanya terdaftar dalam DPM telah memiliki rekening untuk penyaluran program Bantuan Sosial lain, maka

rekening tersebut dapat digunakan untuk menerima Program Bantuan Pangan Non Tunai yaitu e-warung.

5. Besaran Bantuan

Berdasarkan buku kajian awal E-Warung (2017:13), besaran bantuan program e-warung adalah Rp. 30.000.000,00. Bantuan tersebut diberikan hanya sekali dan digunakan sebagai modal untuk membangun kios E-Warung sebesar 10 juta rupiah dan 20 juta sebagai modal awal untuk pembelian barang-barang seperti sembako, timbangan, vacuum (mesin pengempas hampa udara), dan layanan internet.

6. Pengelola E-Warung dan Barang Dagangan

Berdasarkan buku kajian awal E-Warung (2017:23), dalam rangka menjalankan fungsi E-Warung sebagai titik penyaluran dana sembako bagi penerima bansos non tunai dan sebagai sarana usaha ekonomi produktif dibentuk pengelola E-Warung yang terdiri dari 1 orang penyelia yang bertugas sebagai pendamping dan 10 orang anggota pengelola E-Warung (3 pengurus dan 7 orang anggota). Anggota pengelola E-Warung diambil dari ibu-ibu penerima program Keluarga Harapan.

Barang dagangan yang dijual di E-Warung terutama adalah sembako yang ditunjukkan bagi penerima bansos non tunai yaitu beras, gula, minyak dan telur. Selain itu E-Warung menjual barang-barang kebutuhan dari warga sekitar seperti shampo, mie, sabun,

bumbu-bumbu masak. Berdasarkan buku kajian awal E-Warung (2017:30) harga barang yang dijual di E-Warung bervariasi dan menyesuaikan dengan harga yang berada di pasaran.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moeleng (2011:4) “metode kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesa, tetapi perlu memandangnya sebagai dari sesuatu keutuhan”. Moloeng (2011:6) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Menurut Moloeng (2011), penelitian deksriptif adalah pilihan peneliti karena tujuan peneliti yaitu ingin mendapatkan data untuk mendeskripsikan keadaan atau fenomena secara menyeluruh berkenaan dengan implementasi program E-Warung sebagai cara memberdayakan masyarakat miskin.

Penelitian deskriptif sendiri lebih mengarah pada data yang berbentuk olahan kata, serta hasilnya berupa sajian ataupun kutipan-kutipan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang dijadikan sebagai wilayah penelitian, sehingga peneliti memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang diteliti. Penetapan fokus penelitian juga sebagai upaya pencegahan terjadinya pembiasan di dalam mendeskripsikan dan membahas masalah yang diteliti. Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moelong, 2011:97). Menurut Moelong (2011:94), dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Melalui penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang dibuang.

Mengenai pembatasan obyek penelitian, peneliti menentukan fokus penelitian agar penelitian ini bisa lebih terarah dan terinci, tidak melebar dan tidak terlalu luas serta tidak menyimpang dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian

pada implementasi program E-Warung berdasarkan perspektif model Merille Grindle.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Program E-Warung dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Kota Batu. Peneliti menggunakan fokus berdasarkan model implementasi dari Merille S Grindle yaitu:

a. Isi Kebijakan

1. Dasar hukum yang digunakan dalam program E-Warung.
2. Manfaat dari adanya program E-Warung.
3. Harapan yang diinginkan dari program E-Warung
4. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program E-Warung.
5. Sumber daya finansial yang digunakan dalam implementasi program E-Warung.

b. Konteks Implementasi

1. Strategi aktor yang terlibat dalam implementasi program E-Warung.
2. Tanggapan para anggota pelaksana program E-Warung.

c. Hasil Kebijakan (Dampak Kebijakan)

1. Dampak yang diberikan kepada masyarakat atau individu dan kelompok dalam pelaksanaan program E-Warung.
 2. Perubahan yang diperoleh dengan adanya program E-Warung.
2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi program E-Warung dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau letak dimana penelitian akan dilakukan. Moloeng (2011:128) mengemukakan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Pada penelitian ini, lokasi penelitian yang diambil adalah Kota Batu.

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian pada Kota Batu, karena Kota Batu memiliki 6 E-Warung yang tersebar diseluruh kecamatan yang ada di Kota Batu. Penetapan lokasi E-Warung di Kota Batu juga cukup strategis, penetapan berdasarkan kebutuhan dan kemudahan masyarakat penerima bantuan sosial untuk menjangkau E-Warung . Pembangunan daerah Kota Batu juga cukup pesat terutama dalam kepariwisataan, namun dilain sisi masih banyak keluarga miskin yang ada di Kota Batu.

Sementara situs penelitian terletak di Dinas Sosial Kota Batu yang merupakan Dinas yang diberikan kewenangan oleh Pemerintah Kota Batu untuk menyelenggarakan pemerintahan dibidang sosial yang didalamnya termasuk penanggulangan kemiskinan. Situs penelitian tersebut juga ditetapkan berdasarkan kesesuaian dengan substansi penelitian yang mampu memberikan diskripsi yang mendalam mengenai Implementasi Program E-Warung dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Selain Dinas Sosial, situs penelitian yang diteliti peneliti adalah di 3 E-Warung yang

tersebar di Kota Batu, yaitu E-Warung Jaya Abadi Desa Songgokerto, E-Warung Harapan Desa Beji dan E-Warung Sumber Rejeki Desa Gunungsari. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan perkembangan E-Warung jika letaknya berada di dekat pusat Kota dan jauh dari pusat kota. Selain itu ketiga E-Warung tersebut telah berjalan lebih dari 6 bulan, sehingga dapat dilakukan analisis terkait pengelolaan E-Warung dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

D. Sumber Data

Untuk mendapatkan hasil yang baik tentunya ditunjang dengan data-data yang akurat dan valid sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Data-data tersebut digali dari sumber-sumber yang berkaitan atau terlibat dalam masalah yang diteliti. Sesuai dengan jenisnya, data yang diperoleh digolongkan menjadi:

1. Data Primer

Data primer yang sifatnya kualitatif yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber tersebut diperoleh melalui informan yang berhubungan dengan objek penelitian meliputi observasi (pengamatan) serta wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan pegawai Dinas Sosial Kota Batu, Kordinator PKH Kota Batu, Penyelia E-Warung dengan pertimbangan bahwa mereka lebih banyak mengetahui, terlibat dan berkaitan langsung dengan program E-Warung .

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari penggunaan sumber-sumber lain yang tidak langsung dari sumbernya. Sumber data sekunder dari penelitian ini yaitu berupa dokumen, buku-buku dan arsip yang berkaitan dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap yang penting dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan, tepat dan akurat dengan penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dimana peneliti berhadapan langsung dengan narasumber untuk mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pegawai Dinas Sosial Kota Batu, Kordinator PKH Kota Batu, Penyelia E-Warung, dan warga penerima bantuan program E-Warung. Wawancara dilakukan sesuai permasalahan yang diteliti dengan panduan wawancara.

b. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis kejadian-kejadian yang ada di lapangan juga berbagai fenomena yang terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dari berbagai dokumen, baik arsip, buku, laporan, peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang tertulis dari instansi yang menjadi lokasi penelitian. Dokumen-dokumen tersebut tentunya berhubungan dengan Implementasi Program E-Warung Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kota Batu.

F. Instrumen Penelitian

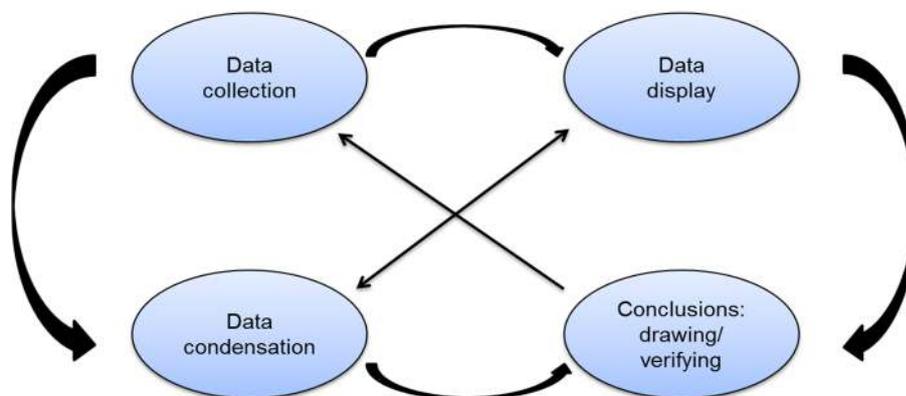
Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan instrumen penelitian dimana instrumen penelitian adalah alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh penulis dalam proses data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti cermat dan lengkap serta sistematis sehingga mudah diolah (Arikunto, 2000). Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah :

- a. Pedoman Wawancara atau *interview guide* yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Hal ini berguna dalam mengarahkan peneliti dalam pengumpulan data terutama dalam melakukan wawancara.
- b. Perangkat penunjang lainnya untuk tulis menulis dan dokumentasi yang meliputi alat tulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dilapangan. Sebagai pelengkap dari catatan dilapangan maka penulis juga memanfaatkan perekam suara, agar memudahkan dalam melakukan pengolahan data.

G. Metode Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2011:244-245) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Pada penelitian ini analisa yang digunakan adalah analisa secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif maka analisa data dintrepentasikan dengan cara melukiskan hasil penelitian dalam bentuk kata atau kalimat. Sehingga analisa data pada penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Analisis data dalam penelitian kualitatif harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dari lapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan analisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan model interaktif. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014), analisis terdiri dari empat alur kegiatan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data, seta penarikan kesimpulan. Dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif (Interactive Model)



Sumber : Miles and Huberman dan Saldana, 2014

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Merupakan kegiatan mengumpulkan data yang diperlukan dalam menentukan tujuan dari penelitian sesuai dengan jenis dan sifat data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah proses pengolahan data ke dalam sejumlah kategori yang sesuai, yang akhirnya akan memudahkan dalam rangka menuturkan, menyimpulkan dan menginterpretasikan data. Selain itu, penyajian data juga berfungsi sebagai daftar yang bisa secara cepat menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan.

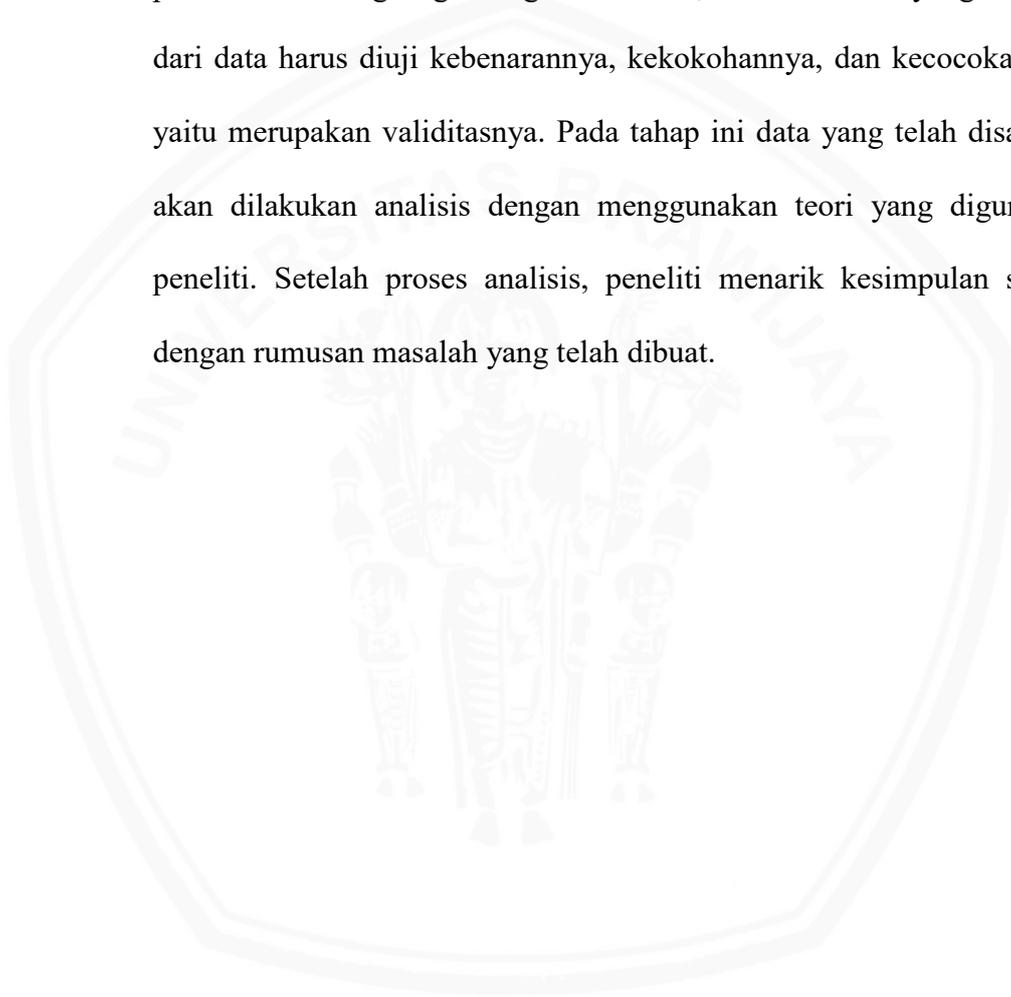
3. Kondensasi Data (*Condensation Data*)

Merujuk pada proses pemilihan menyederhanakan, memfokuskan, dan mengabstrakan secara umum adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya dapat berupa teks naratif,

matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan-kesimpulan juga perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Dengan kata lain, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yaitu merupakan validitasnya. Pada tahap ini data yang telah disajikan akan dilakukan analisis dengan menggunakan teori yang digunakan peneliti. Setelah proses analisis, peneliti menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Batu

a. Sejarah Kota Batu

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sejak abad ke-10, wilayah Kota Batu dan sekitarnya telah dikenal sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan, karena wilayahnya adalah daerah pegunungan dengan kesejukan udara yang nyaman, juga didukung oleh keindahan pemandangan alam sebagai ciri khas daerah pegunungan. Pada masa lampau yaitu pemerintahan Raja Sendok, seorang petinggi kerajaan bernama Mpu Supo diperintah Raja Sendok untuk membangun tempat peristirahatan keluarga kerajaan di pegunungan yang didekatnya terdapat mata air. Dengan upaya yang keras, akhirnya Mpu Supo menemukan suatu kawasan yang sekarang lebih dikenal sebagai kawasan Wisata Songgoriti.

Wilayah Kota Batu yang terletak didataran tinggi di kaki Gunung Panderman dengan ketinggian 700 sampai 1100 meter di atas permukaan laut, berdasarkan kisah-kisah orang tua maupun dokumen yang ada maupun yang dilacak keberadaannya, sampai saat ini belum diketahui kepastiannya tentang kapan nama Batu mulai disebut untuk menamai

kawasan peristirahatan tersebut. Dari beberapa pemuka masyarakat setempat memang pernah mengisahkan bahwa sebutan Batu berasal dari nama seorang ulama pengikut Pangeran Diponegoro yang bernama Abu Ghonaim atau disebut sebagai Kyai Gubug Angin yang selanjutnya masyarakat setempat akrab menyebutnya dengan panggilan Mbah Wastu. Dari kebiasaan kultur jawa yang sering memperpendek dan mempersingkat mengenai sebutan nama seseorang yang dirasa terlalu panjang, juga agar lebih singkat penyebutannya serta lebih cepat bila memanggil seseorang, akhirnya lambat laun sebutan Mbah Wastu dipanggil Mbah Tu menjadi Mbatu atau Batu sebagai sebutan yang digunakan untuk kota dingin ini di Jawa Timur. (Sumber <http://website.batukota.go.id>).

Panorama alam indah dan berudara sejuk, tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat lain juga wisatawan domestik dan mancanegara untuk mengunjungi dan menikmati Kota Batu sebagai kawasan pegunungan yang mempunyai daya tarik sendiri. Untuk itulah di awal abad 19 Kota Batu berkembang menjadi tujuan daerah wisata, khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itupun membangun tempat-tempat peristirahatan dan akhirnya yang bermukim di Kota Batu. Situs dan bangunan-bangunan peninggalan dari orang Belanda atau semasa pemerintahan Belanda itu pun masih berbekas. Begitu kagumnya orang Belanda atas keindahan dan keelokan Kota Batu, sehingga Bangsa Belanda mensejajarkan wilayah Kota Batu dengan sebuah negara di Eropa yaitu Switzerland dan memberikan predikat sebagai “*De Klein Switzerland*” atau

Swiss kecil di Pulau Jawa. Peninggalan arsitektur dengan nuansa dan corak Eropa pada masa penjajahan Belanda dalam bentuk sebuah bangunan yang ada saat ini serta panorama alam yang indah di kawasan Kota Batu sempat membuat Bapak Proklamator sebagai *The Father Foundation of Indonesia* yaitu Bung Karno dan Bung Hatta setelah perang kemerdekaan untuk mengunjungi dan beristirahat di kawasan Selecta, Kota Batu. (Sumber <http://website.batukota.go.id>).

Kota Batu merupakan daerah otonom baru di Provinsi Jawa Timur yang terbentuk pada tahun 2004. Kota Batu sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Malang yaitu pada Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 atau disebut dengan SSWP 1 Malang Utara. Pada tahun 2010 Kota Batu terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo, Kecamatan Bumiaji dan terdiri dari 24 desa/kelurahan, 231 RW dan 1.092 RT (sumber: *Batu Dalam Angka 2011*).

b. Geografis

Kota Batu dalam kondisi geografisnya dapat dibagi menjadi dua bagian utama yaitu daerah lereng atau bukit dengan proporsi bagian lebih luas dan ~~daerah dataran. Luas secara keseluruhan kawasan Kota batu~~ adalah sekitar 19.908,72 ha atau 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Jika dilihat dari segi astronomi, Kota Batu terletak pada posisi 122°17'-122°57' Bujur Timur dan 7°44'8"26' Lintang Selatan. Bats-batas wilayah Kota Batu sebagai berikut:

paling subur dengan luas 6.231,12 Ha. Dari 6.231,12 Ha terbagi menjadi lahan tanah yang memiliki kesuburan 3.026,37 Ha dan sisanya merupakan lahan tanah yang kurang subur dan memiliki kandungan kapur, dan jenis tanah latosol. Informasi geologis tersebut menggambarkan bahwa Kota Batu memiliki wilayah yang kandungan tanahnya sangat subur dan cocok untuk pertanian. Jenis tanahnya terbentuk dari endapan gunung-gunung yang mengelilingi Kota Batu. Mata pencaharian dari penduduk Kota Batu sebagian besar didominasi dari sektor pertanian. (*sumber: Batu Dalam Angka 2011*).

Kota Batu merupakan salah satu daerah pegunungan yang berhawa dingin dengan suhu udara mencapai 21,3 derajat Celcius dan 34 derajat Celcius. Wilayah Kota Batu secara umum adalah daerah perbukitan dan pegunungan. Terdapat tiga gunung, yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.399 meter). (*sumber: <http://www.eastjava.com/tourism/batu/ina/about.html>*).

Kota Batu adalah salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki pemandangan alam yang sangat indah, sehingga banyak sekali dijumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan panoram alamnya. Ketersediaan sumber mata air di Kota Batu banyak dipengaruhi oleh sungai-sungai yang mengalir di bagian pusat kota. Ketersediaan sumber-sumber mata air cukup potensial, dimana mata air tersebut dikonsumsi oleh penduduk Kota batu itu sendiri dan sekitarnya. Kota Batu sampai saat ini telah di inventarisasi sebanyak 83 sumber mata air yang masih produktif

dan selama ini digunakan oleh beberapa PDAM daerah terdekat untuk mengairi wilayahnya yaitu PDAM unit Kota Batu, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Malang juga digunakan oleh pihak swasta dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan.

c. Visi dan Misi Kota Batu

1) Visi Kota Batu 2012-2017

“Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisataaan Internasional”

Ditunjang oleh pendidikan yang tepat guna dan berdaya saing ditopang sumberdaya yaitu alam, manusia dan budaya yang tanggung diselenggarakan oleh pemerintah yang baik, kreatif, inovatif, dijiwai oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (*Sumber <http://website.batukota.go.id>*).

2) Misi Kota Batu Tahun 2012-2017

- a) Peningkatan Kualitas Hidup Antar Umat Beragama
- b) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
- c) Mengembangkan Pertanian Organik dan Perdagangan Hasil Pertanian Organik
- d) Meningkatkan Posisi Peran dari Kota Sentra Pariwisata Menjadi Kota Kepariwisataaan Internasional
- e) Peningkatan Kualitas Pendidik dan Lembaga Pendidikan
- f) Peningkatan Kualitas Kesehatan

- g) Pengembangan Infrastruktur (Sektor Fisik) Khususnya Perkantoran Pemerintah, Fasilitas Publik, Prasarana dan Sarana Lalu Lintas
- h) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Guna Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
- i) Menciptakan Stabilitas dan Kehidupan Politik Di Kota Batu Yang Harmonis dan Demokratis
- j) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi dan UKM

2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Batu

a. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Batu

1) Visi

Visi SKPD adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi yang ingin dicapai SKPD melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Selain itu, Visi SKPD merupakan gambaran yang menantang tentang keadaan yang diinginkan oleh suatu Perangkat Daerah agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang bisa menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi juga suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Jadi, pada hakekatnya membentuk visi organisasi adalah menciptakan

gambaran bersama mengenai masa depan yang harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategik merupakan langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai atau awal berkarya, tetapi juga penting pada perjalanan kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan eksternal dan internal, oleh karena itu visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan kondisi perubahan tersebut.

Dinas Sosial Kota Batu harus dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masyarakat, yaitu upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintahan, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rahbilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara kelembagaan diharapkan akan mampu tercapai yaitu terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Sebagai bagian dari visi Kota Batu yaitu, Kota Batu Sentra Pertanian Organik Berbasis Kepariwisata Internasional maka, visi dari Dinas

Sosial Kota batu sebagai terjemahan visi misi dan agenda pembangunan Kota Batu adalah:

“Menuju Masyarakat Kota Batu Produktif dan Sejahtera Tahun 2017” (Sumber: Dinas Sosial Kota Batu Tahun 2017)

2) Misi

Untuk mewujudkan visi diatas maka selanjutnya Dinas Sosial Kota Batu menjabarkan visi tersebut dalam misi yang menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas melalui pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Jadi, misi memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan atau upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Adapun misi Dinas Sosial Kota Batu adalah sebagai berikut:

- a. Menanggulangi kemiskinan
- b. Mencegah meluasnya pengangguran
- c. Meningkatkan kesejahteraan sosial
- d. Meningkatkan pelayanan Publik dan penyelenggaraan tata pemerintahan Daerah yang baik (*Good Local Governmance*)

b. Logo Dinas Sosial

KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 4.2 Logo Dinas Sosial Kota Batu

Sumber: <https://www.kemsos.go.id/page/logo>

Bentuk teratai dengan lima kelopak yang menjadi satu kesatuan menggambarkan Pancasila dengan makna bahwa Departemen Sosial bersikukuh mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk grafis persegi dengan empat sayap burung garuda menggambarkan kandungan filosofis pelayanan sosial melalui empat pilar yaitu : rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial.

Bentuk manusia mengandung arti pemanusiaan itu sendiri, yang merupakan subjek dan objek dari pelayanan sosial, dan mengusung kredibilitas dan jati diri untuk memanusiakan manusia.

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Batu berpedoman pada peraturan Walikota Batu No. 6 Tahun 2010 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Batu.

a. Tugas Pokok

Dinas Sosial Kota Batu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

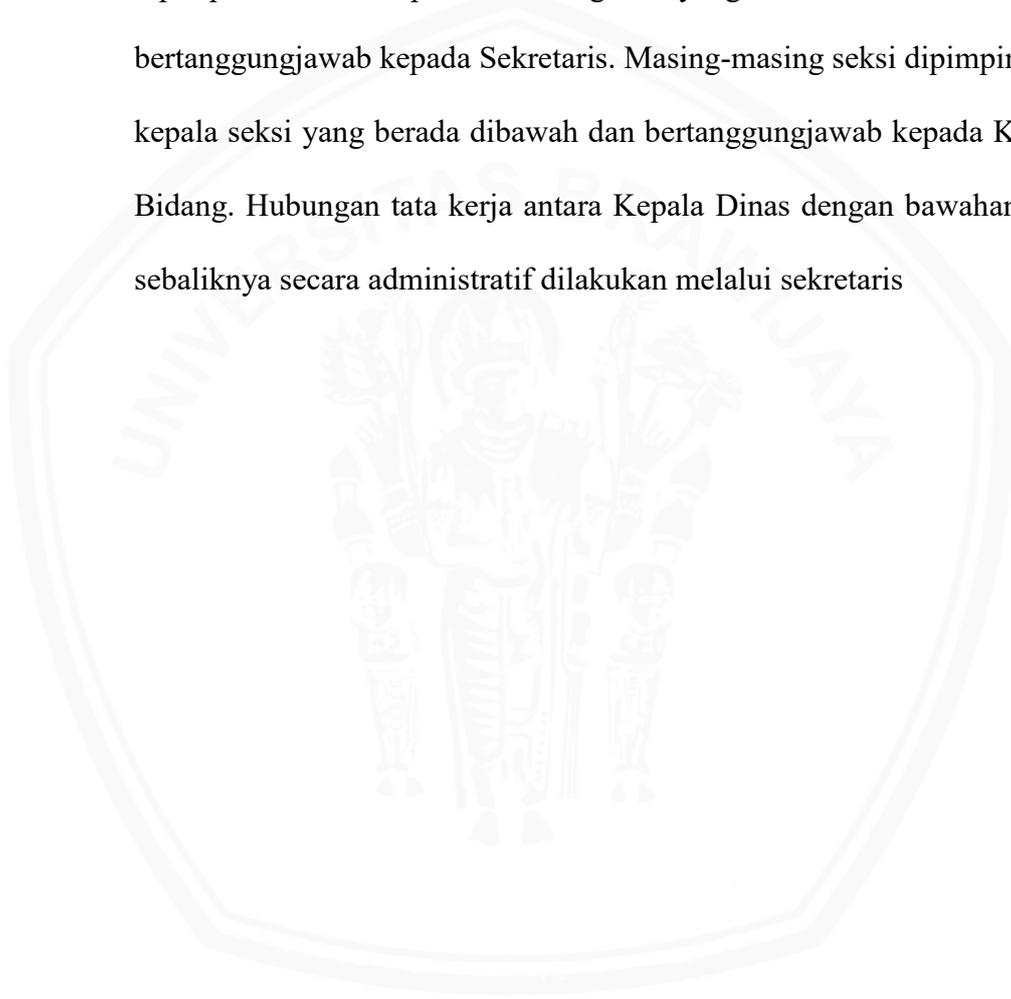
b. Fungsi

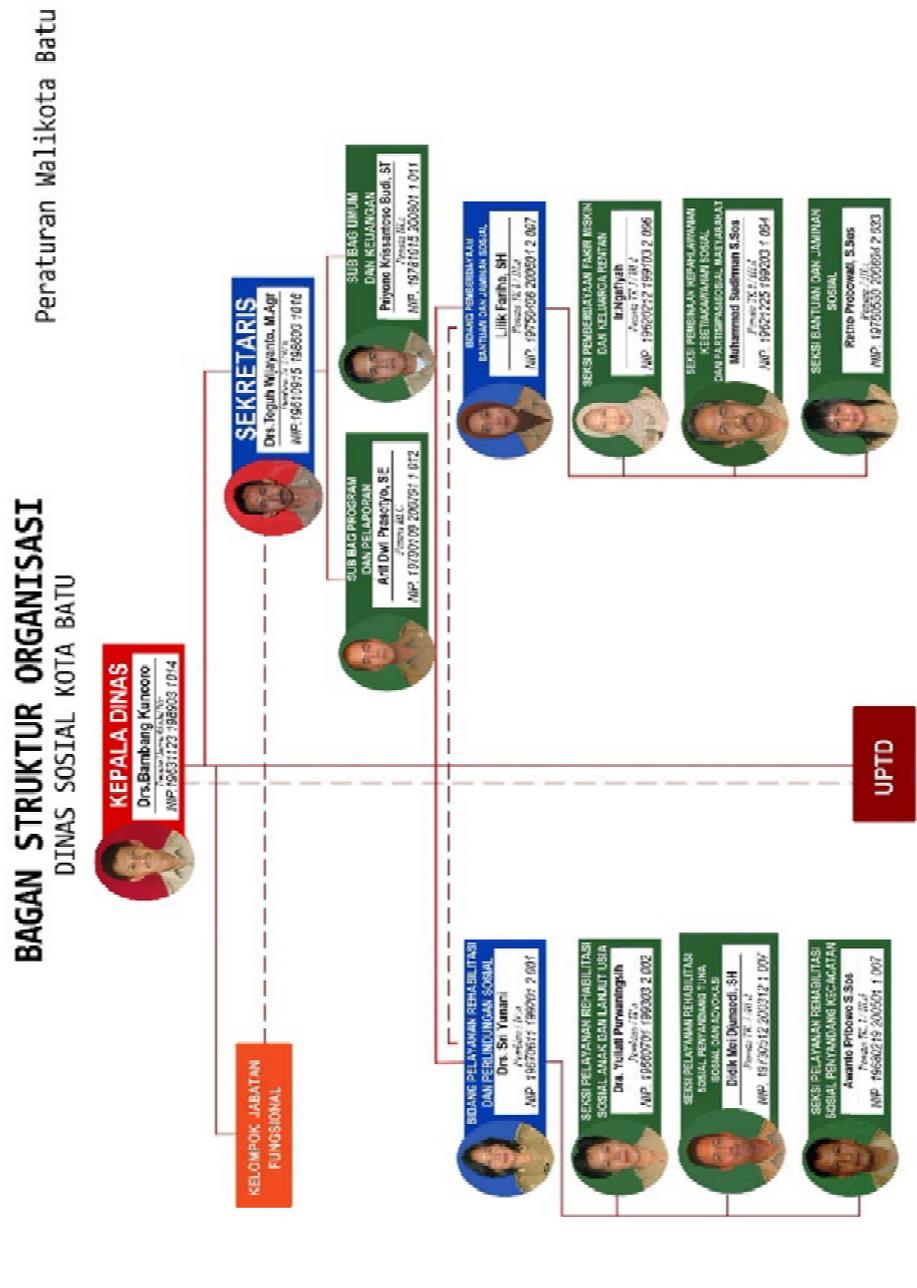
- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial
- 2) Penyelenggaraan urusan sosial serta pelayanan umum sesuai lingkup tugas
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tupoksi

d. Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi (gambar 4.3), organisasi Dinas Sosial terdiri atas Sekretariat yang membawahi Sub Bagian Pelaporan dan Sub Bagian Umum dan Keuangan. Bidang Pelayanan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia, dan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial dan Advokasi, dan Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Kecacatan. Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial yang membawahi Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Keluarga Rentan, Seksi Pembinaan Kepahlawanan Sosial dan Partisipasi Sosial Masyarakat dan Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sementara masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub-bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Hubungan tata kerja antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui sekretaris





—————
Garis Komando
.....
Garis Koordinasi

Gambar 4.3 Bagan Struktur Dinas Sosial Kota Batu

Sumber: Dinas Sosial Kota Batu Tahun 2018

B. Penyajian Data

1. Implementasi Program E-Warung dalam pemberdayaan masyarakat miskin

Program E-Warung merupakan program yang dibentuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan pelaksanaannya secara pemberdayaan untuk masyarakat miskin. Pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang dapat dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 bahwa penanganan fakir miskin merupakan suatu upaya yang dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

Kementerian Sosial Republik Indonesia membentuk program E-Warung yang merupakan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yang ada. Pemberdayaan masyarakat miskin melalui program E-Warung ini dengan cara pemberian bantuan stimulan yang digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi pembentukan E-Warung melalui pendampingan yang dalam mengembangkan usaha dilakukan secara bersama-sama. Informasi-informasi tentang pengimplementasian atau pelaksanaan program E-Warung didapatkan melalui penelitian di Dinas Sosial Kota Batu. Program E-Warung ini merupakan program pemberdayaan dengan mempertimbangkan wilayah. Program E-Warung ini dilaksanakan dengan adanya koordinasi Kemensos dan Dinas Sosial

Kota Batu. Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu Lilik selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kota Batu mengenai pelaksanaan E-Warung:

“Pelaksanaan Program E-Warung ini berjalan Di Kota Batu dimulai pada bulan Oktober 2016 mas. Pelaksanaan program pada awalnya didahului dengan pengusulan beberapa proposal oleh penyelia E-Warung yang dikirimkan ke Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Batu, tetapi tidak setiap proposal yang dikirimkan akan disetujui mas. Proposal disetujui atau engga, tergantung dari pusatnya sendiri menyetujui usulan kita atau tidak. Ini kan sifatnya program nasional mas, jadi ya harus bergantian dengan daerah lainnya. Jadi kita ikut dari pusat saja mas, karena memang dana bantuan E-Warung untuk Kota Batu ini dari pusat saja yaitu Kementerian Sosial. Selain itu penerimaan proposal juga menyesuaikan kuota setiap daerah, nah Kota Batu mendapat jatah pendirian 8 E-Warung mas.” (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya pernyataan dari Mbak Hana selaku kordinator PKH Kota Batu di Dinas Sosial Kota Batu menyampaikan pendapat:

“Pengusulan dana pertama dilakukan melalui kelompok PKH yang sudah terbentuk melalui seleksi yang dilakukan kordinator PKH. Proposal yang telah dibuat akan dikirimkan melalui penyelia ke Dinas Sosial Kota Batu untuk dilimpahkan ke Kementerian Sosial untuk di proses. Dalam pengusulan proposal E-Warung ini juga menyesuaikan kuota setiap daerah mas”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB.

Implementasi dari program E-Warung tersebut dalam pelaksanaannya pasti ada yang namanya kegiatan, kegiatan yang dilakukan memang harus sesuai dengan petunjuk atau tata cara dari program E-Warung sendiri. Program E-Warung di Kota Batu yang telah berlangsung sejak Oktober 2016. Kegiatan E-Warung yang dilaksanakan di Kota Batu ialah sebagai berikut:

1) Pembentukan Kelompok Pengelola E-Warung

Program E-Warung merupakan suatu program pemberdayaan masyarakat miskin dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Setelah adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu ke penyelia E-Warung yang telah ditunjuk, masing-masing penyelia akan melakukan pendampingan kepada para kelompok pengelola E-Warung. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Lilik selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kota Batu:

“Jika proposal kelompok pengelola E-Warung ini sudah disetujui oleh Kementerian Sosial, nanti lewat Dinas Sosial Kota Batu akan memberitahukan kepada kelompok penerima. Setelah mendapatkan dana bantuan akan membuat masing-masing satu rekening yang akan dibantu pihak bank BNI. Nama rekening bank juga menyesuaikan nama E-Warung yang ada, yang membuat rekening adalah ketua dan bendahara. Jika sudah disetujui berarti akan siap menerima dana bantuan E-Warung ini. Setelah rekening jadi, masing-masing kelompok akan menerima bantuan sebesar 30 juta. Dana 10 juta digunakan untuk membangun E-Warung dan yang 20 juta untuk modal E-Warung. Nantinya masing-masing E-Warung akan dibantu oleh penyelia yang ditunjuk oleh Dinas Sosial Kota Batu untuk membantu proses pelaksanaan E-Warung. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB).

Berikut ini ialah tabel nama E-Warung yang ada di Kota Batu di Tahun 2017 ialah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tabel E-Warung

No	Nama E-Warung	Nama Desa	Ketua
1	E-Warung Jaya Abadi	Songgokerto	Endah Puji

No	Nama E-Warung	Nama Desa	Ketua
2	E-Warung Harapan	Beji	Sri Wahyuni
3	E-Warung Melati	Sisir	Djumiah
4	E-Warung Sumber Rejeki	Gunungsari	Rukiyati
5	E-Warung Sumber Makmur	Jurangkuali	Supriyani
6	E-Warung Jaya Abadi	Dadaprejo	Siti Hidayati

Sumber: Dinas Sosial Kota Batu tahun 2017

Berikut ini adalah tabel jumlah keluarga penerima manfaat program Bantuan Pangan Non-Tunai di seluruh Kota Batu per Agustus 2017.

Tabel 4.2 Jumlah Penerima BPNT di Kota Batu

NO	Kecamatan	Jumlah Penerima
1	Batu	974
2	Bumiaji	1.013
3	Junrejo	311
Total : 2.298 Kepala Keluarga		

Sumber: Dinas Sosial Kota Batu Tahun 2017

2) Pendampingan dalam Pemberdayaan Kelompok Pengelola E-Warung

Program E-Warung merupakan wadah dari pemberdayaan masyarakat miskin untuk bersama-sama mengelola E-Warung yang ada demi mencapai tujuan dari program E-Warung itu sendiri. Tujuan pendampingan dalam program E-Warung menurut buku kajian awal pelaksanaan E-Warung tahun 2017 ialah sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan kemampuan anggota dalam menemukan permasalahan, memecahkan permasalahan dan menggali potensi sumber daya yang ada dalam anggota.
- b. Meningkatkan kemampuan kelompok pengelola E-Warung dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pemecahan masalah kesejahteraan sosial.
- c. Meningkatkan kemampuan Kelompok Pengelola E-Warung dalam mempertanggungjawabkan kegiatan usaha ekonomi dan usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan secara bersama-sama.

Penyelia dalam program E-Warung mempunyai peran yang penting dalam perkembangan E-Warung, mulai dari pembentukan E-Warung, mencari calon penerima program E-Warung. Berikut penjelasan dari Ibu Lilik selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kota Batu:

“Pendampingan dalam program E-Warung ini dilaksanakan oleh penyelia di tiap E-Warung yang ada. Penyelia disini tugasnya mendampingi dalam pelaksanaan E-Warung yang ada di E-Warung masing-masing. Dalam hal ini penyelia dari awal sudah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Sosial untuk memberikan

pengetahuan ke anggota kelompok E-Warung tentang aturan dan pengelolaan E-Warung yang akan dijalankan”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB).

Mbak Nana selaku penyelia E-Warung memberikan penjelasan terkait dengan pendampingan kepada kelompok E-Warung ialah sebagai berikut:

“Saya sebagai penyelia E-Warung mas memang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendampingi kelompok E-Warung untuk melaksanakan program mas. Memanfaatkan dana yang diberikan dengan baik. Selain itu juga untuk melaksanakan pertemuan rutin dalam kelompok. Dengan pendampingan ini dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi dari masing-masing kelompok mas”. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 WIB)

3) Pelaksanaan Program E-Warung di Kota Batu

Kegiatan E-Warung dilaksanakan di Kota Batu adalah mengelola E-Warung yang ada secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dari program E-Warung, baik itu melayani pembelian oleh para penerima bantuan BPNT maupun pembeli non BPNT. Berdasarkan wawancara dengan mbak Nana selaku penyelia E-Warung Desa Songgokerto yang menyampaikan pendapat sebagai berikut:

“Pada awalnya kita memang menunggu keputusan dari Kemensos mas disetujui apa tidak. Jika sudah disetujui, Dinas Sosial Kota Batu akan memberitahukan ke kami mas para penyelia untuk melakukan pertemuan dengan anggota kelompok E-Warung yang sudah disetujui. Dari situ pihak Bank BNI dan Dinsos ikut membantu dalam hal pembukaan rekening untuk pencairan dana dari Kemensos. Hanya satu rekening kelompok, karena kan usaha bersama mas, dari situ kita akan membelanjakan sesuai aturan yang berlaku. E-Warung ada kan dengan tujuan untuk melayani pembelian dari para penerima BPNT dengan menggunakan kartu

sejahtera yang telah disediakan oleh pihak Bank BNI, yang nantinya akan digesekan di mesin EDC (Electronic Data Capture), selain itu E-Warung juga dapat melayani pembelian masyarakat umum dengan uang tunai. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 WIB)



Gambar 4.4 Mesin Electronic Data Capture

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2018

Setelah adanya rapat dan kordinasi yang telah dilakukan masing-masing kelompok nantinya akan diberi penanda E-Warung yang diberikan oleh pihak Bank BNI melalui Dinas Sosial Kota Batu. Contoh dalam hal ini adalah pemberian papan nama untuk memberikan tanda kepada masing-masing E-Warung yang telah diberikan. Mbak Nana selaku penyelia E-Warung memberikan pendapatnya tentang pelaksanaan E-Warung:

“Nanti papan nama yang sudah dibuat dan disediakan akan dipasang masing-masing E-Warung. Hal ini bertujuan untuk memberikan identitas pada masing-masing E-Warung dan memudahkan para penerima BPNT untuk mengenali E-Warung yang ada”. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 WIB)



Gambar 4.5 : Papan Nama E-Warung Desa Beji

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2018

Selanjutnya setelah papan nama dipasang bahwa masing-masing E-Warung sudah ada tanda pengenalnya. Hal ini akan memudahkan para pembeli baik itu dari penerima BPNT maupun non BPNT dalam melakukan transaksi. Menurut Mbak Nana selaku penyelia memberikan pendapat seperti berikut:

“Ya biasanya saya sebagai pendamping langsung ke lokasi mas untuk sekedar melihat perkembangan dari E-Warung yang ada. Ditambah lagi permasalahan yang terjadi di dalam kelompok saya berusaha mencari jalan keluar yang nantinya bisa dibicarakan dengan kelompok”. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 WIB)

Penyelia akan selalu melakukan pendampingan dalam melaksanakan kegiatan dari program E-Warung untuk memantau bagaimana jalannya E-Warung ini. Kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya penjelasan terkait E-Warung Ibu Lilik selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kota Batu:

“Untuk pelaksanaan E-Warung ini akan didampingi oleh penyelia yang sudah ditunjuk oleh Dinas Sosial mas. Nantinya para kelompok E-Warung ini akan melakukan kegiatan bersama dengan usaha yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB).



Gambar 4.6 : Pelaksanaan Kegiatan E-Warung

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2018

4. Melayani Pencairan Bantuan Sosial Non-Tunai

Sistem transaksi di E-Warung dilakukan secara non-tunai menggunakan kartu KKS yang telah disalurkan kepada masing-masing peserta. Hal ini, ditujukan untuk dapat mengoptimalkan penerimaan bantuan sosial secara lebih efektif dan efisien. Menurut Mbak Nana selaku penyelia memberikan pendapat seperti berikut:

“Dalam proses transaksi non-tunai, melalui beberapa tahapan yaitu : *Pertama*, KPM yang telah memiliki Kartu KKS datang ke E-Warung yang telah tersedia. *Kedua*, KPM memilih jenis bahan pangan yang dibutuhkan dan melakukan proses transaksi pembelian bahan pangan, menggunakan Kartu KKS tersebut. *Ketiga*, pengelola E-Warung menyerahkan bukti transaksi dan peserta KPM kembali membawa bahan pangan sesuai dengan keinginan.

Berikut penjelasan dari Ibu Lilik selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial di Dinas Sosial Kota Batu

“Jadi gini mas apabila dana bantuan yang ada pada kartu KKS masih tersedia dan tidak habis dalam 1 bulan, maka uang tersebut

secara otomatis akan tersimpan di tabungan peserta dan dapat digunakan untuk bulan berikutnya mas, jadi kalau bulan ini tidak dibelanjakan, dapat dibelanjakan pada bulan selanjutnya. Dan dalam proses transaksi, E-Warung hanya menyediakan pembayaran secara non-tunai mas dan tidak menerima uang secara cash/tunai, hal ini mampu mengurangi kesalahan-kesalahan dalam proses transaksi tersebut mas". (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB).



Gambar 4.7 Kartu Keluarga Sejahtera yang digunakan untuk pembelian barang non tunai di E-Warung

Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2018

5. Melayani Penjualan Bahan Pangan Pokok Murah Bagi Penerima Bantuan Sosial

Di E-Warung, pengelola menyediakan kebutuhan bahan pangan pokok dan keperluan lain bagi peserta penerima manfaat. Bahan pangan tersebut antara lain: beras, minyak goreng, gula pasir dan tepung yang dijual dengan harga di bawah pasar. Harga yang dijual sangat bervariasi tergantung dari masing-masing jenis produk/bahan pangan. Selisih harga komoditas yang dijual di E-Warung lebih murah, ketimbang produk yang dijual di pasar. Menurut Mbak Nana selaku penyelia memberikan pendapat seperti berikut:

“Kita berusaha mencari distributor barang termurah mas, jadi saya sebagai penyelia bertugas untuk mencari informasi supplier beras telor yang termurah dan menghubungi mereka. Namun dalam mencari informasi saya juga bekerja sama dengan para penyelia E-Warung lain yang ada di Kota Batu. Hal ini dilakukan agar kita bisa menjual beras dan telor dengan harga yang terjangkau dan

pendapatan yang kita dapatkan bisa semakin maksimal mas. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 WIB)

Bahan pangan yang dijual memiliki kualitas yang baik dan memiliki harga yang relatif murah. Bahan pangan ini, dipasok dari distributor yang akan mengirimkan bahan pangan pokok sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, E-Warung juga dapat memasarkan produk dari Kube Jasa, sehingga dapat menambah penghasilan bagi Kube Jasa itu sendiri.

Tabel 4.3 Perbandingan Harga Barang Di E-Warung dan Di Pasaran

No	Barang	Di E-Warung	Harga Pasar
1	Beras	Rp.8000	Rp. 8.500
2	Telur	Rp. 17.000	Rp. 17.500
3	Minyak Goreng	Rp. 12.500	Rp.13.000
4	Gula	Rp. 13.000	Rp. 14.000
5	Tepung Terigu	Rp. 7000	Rp. 8000

Sumber: Temuan Hasil Lapangan Tahun 2018

a) Isi Kebijakan

1) Dasar Hukum yang digunakan dalam program E-Warung

Dasar hukum yang menjadi landasan program pasti sesuai dengan isi program yang akan dijalankan nantinya. Program E-Warung dilaksanakan atau dijalankan berdasarkan beberapa dasar hukum yang

telah ditentukan oleh pihak pusat. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Bu Lilik selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Batu menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya program untuk masyarakat miskin akan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dari masyarakat terutama untuk masyarakat dengan perekonomian yang rendah, mungkin dasar hukum yang mengatur yaitu kesejahteraan sosial ya mas. Saya agak lupa dengan dasar hukum tersebut, tapi kalau tidak salah kesejahteraan tersebut diatur di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mas, nanti tolong mas nya cek lagi ya benar atau tidak dengan kesesuaian dengan dasar hukum itu”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pukul 14.00)

Dari wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa program E-Warung ini merupakan program yang dibentuk oleh pusat yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kebijakan dari program E-Warung ini tertuang dalam dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin.

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Pengembangan Saran Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha bersama Program Keluarga Harapan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

2) Manfaat dari adanya Program E-Warung

Adanya program E-Warung ini yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat miskin, tentunya mempunyai manfaat dalam pelaksanaan program. Program yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini pasti mempunyai manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima dari bantuan program E-Warung ini. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mbak Hana selaku kordinator PKH Kota Batu yang berpendapat bahwa:

“Manfaatnya menurut pendapat saya yaitu dapat memberdayakan masyarakat miskin yang nantinya akan menambah produktifitas mereka dalam mengelola E-Warung. Nantinya diharapkan bahwa agar program E-Warung dapat menambah pendapatan masyarakat miskin, maksudnya itu secara ekonomi pendapatan masyarakat dapat meningkat. Jadi pemberdayaan masyarakat miskin melalui program E-Warung ini dapat dilakukan sehingga pendapatan

masyarakat penerima sedikit banyak dapat meningkat. Mungkin sebelum adanya program E-Warung tidak memiliki penghasilan, dan hanya sebagai ibu rumah tangga atau pengangguran, namun semenjak menjadi pengelola E-Warung jadi memiliki penghasilan”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Selanjutnya dalam hal ini manfaat dari Program E-Warung ini menurut Ibu Lilik selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Batu menyatakan bahwa:

“Manfaat yang ada itu seharusnya dapat dirasakan oleh penerima bantuan yang ada pada masing-masing pengelola E-Warung mas. Memang manfaat yang diperoleh dari program E-Warung ini secara garis besar adalah tingkat perekonomian dari masyarakat dapat meningkat. Tetapi bukan hanya itu saja mas manfaat dari E-Warung itu sendiri jika dijalankan dengan baik dan benar. Menurut saya selain dilihat dari bidang ekonomi yaitu pendapatan masyarakat meningkat yang mana kesejahteraan masyarakat miskin juga dapat meningkat. Selanjutnya ini yang paling penting dari adanya program E-Warung ini dapat menimbulkan kerukunan, sosial itu kan yang ditonjolkan yaitu kesatuan dan kerjasama antar anggota kelompok PKH pengelola E-Warung ini, sehingga timbul kepercayaan diri, kebersamaan, solidaritas sosial dan keharmonisan. Dengan kata lain adanya E-Warung ini dapat menciptakan kebersamaan dan solidaritas sosial serta rasa kesetiaan antar pengelola E-Warung itu, karena dilakukan secara kelompok”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Menurut Mbak Nana selaku penyelia E-Warung berpendapat bahwa manfaat dari program E-Warung ini adalah:

“Kalau untuk program E-Warung ini manfaatnya banyak mas, contohnya mengurangi tingkat kemiskinan dengan program usaha bersama untuk masyarakat miskin ini. Selanjutnya bisa untuk mendapatkan tambahan pendapatan untuk keluarga mas. Jadi usaha bersama ini bisa jadi sampingan ataupun pendapatan lain untuk masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Terus kita bisa meningkatkan kerjasama kelompok antar anggota PKH pengelola E-Warung. Dengan adanya E-Warung ini dapat membantu meningkatkan kerjasama kelompok masyarakat penerima bantuan, ini kan memang usaha dilaksanakan bersama,

jadi ya pasti kerukunan dan sifat gotong royong akan tercipta mas dengan adanya program ini". (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 WIB)

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat dijelaskan bahwa adanya program E-Warung ini dalam pembentukannya mempunyai manfaat yang diperoleh. Manfaat dari program E-Warung dalam pemberdayaan masyarakat miskin ini diharapkan mampu diterima baik oleh masyarakat atau kelompok yang menerima bantuan. Dari beberapa penjelasan yang ada dapat disimpulkan bahwa manfaat dari program E-Warung ini adalah dilihat dari segi sosial maupun segi ekonomi. Dengan hal ini dapat dijelaskan tiga aspek atau dimensi yang ada dalam program E-Warung yaitu:

a. Bidang Kelembagaan

Kelembagaan dalam program E-Warung ialah dapat melaksanakan kegiatan usaha E-Warung secara jelas dan rinci dengan memaksimalkan kelembagaan dengan struktur yang jelas sesuai dengan pembagian tugas bagi seluruh anggota pengelola E-Warung.

b. Bidang Sosial

Pada Bidang sosial yang ada dalam program E-Warung adalah adanya nilai kejujuran, tanggung jawab terhadap para anggota pengelola E-Warung, kesetiakawanan sosial dan gotong royong. Selain itu dengan adanya iuran bulanan sosial akan menumbuhkan kesadaran dan kemauan anggota kelompok

untuk merubah kondisi atau keadaan ke arah kondisi kehidupan yang lebih baik.

c. Bidang Ekonomi

Nilai ekonomi yang ada dalam program E-Warung merupakan terwujudnya beberapa indikator ekonomi yang berkaitan dengan penambahan pendapatan yang nantinya akan menghasilkan peningkatan kehidupan ekonomi dari masing-masing anggota. Pengelolaan E-Warung ini merupakan salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan dari para anggota E-Warung.

Selanjutnya ketiga dimensi yang ada dalam konsep program E-Warung dengan peningkatan kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin yang mana dapat menciptakan sumber pendapatan baru dari sisi tabungan serta dapat meningkatkan kesetiakawanan di lingkungan para anggota pengelola E-Warung. Dalam pelaksanaan program E-Warung ini adanya dimensi sosial yang harus dilaksanakan setiap bulan. Masing-masing dari kelompok E-Warung melakukan pertemuan setiap bulan.

Dengan adanya pertemuan setiap bulan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan rasa kesetiakawanan dari masing-masing anggota serta mengevaluasi dan membahas rencana satu bulan kedepan. Dalam hal ini pertemuan yang dilaksanakan pada anggota E-Warung biasanya dilakukan agar terciptanya rasa gotong royong dan saling kerjasama yang

baik antar anggota. Hal ini menurut Mbak Nana selaku penyelia E-Warung Desa Songgokerto berpendapat bahwa:

“Memang mas disini setiap bulan selalu dilaksanakan pertemuan yang dilakukan di rumah salah satu pengelola E-Warung, biasanya di rumah ketua atau sekretaris. Ya jika pertemuan begini, banyak hal yang dapat dilakukan bersama-sama para anggota E-Warung. Pertemuan dilakukan untuk evaluasi, membagi laba penghasilan, serta untuk menciptakan rasa kebersamaan diantara anggota. Saya sendiri selaku penyelia merasa sangat senang jika ada kegiatan pertemuan ini mas, ya soalnya kekeluargaan dari masing-masing anggota akan terlihat jika sedang berkumpul. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 WIB)



Gambar 4.8 : Pertemuan Rutin Anggota Pengelola E-Warung

Sumber : Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2018

Pertemuan yang dilaksanakan setiap bulan selain melakukan evaluasi atau pembagian laba setiap, adanya kegiatan pengepakan barang yang dilakukan bersama-sama. Pengepakan barang yang dijual di E-Warung seperti beras dan gula, pengepakan yang dari karung dimasukkan kedalam plastik-plastik. Melalui hal ini akan terciptanya rasa gotong royong diantara pengelola E-Warung, untuk saling tolong

menolong diantara satu dengan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ibu Sri Wahyuni selaku ketua E-Warung Desa Beji yang menyatakan bahwa:

“Iya mas memang dalam pertemuan itu, selesai kami rapat biasanya kami akan bergotong royong untuk mengepak beras dan gula kedalam plastik, karena kan ketika kami beli dari distributor itu masih dalam bentuk karung. Melalui pengepakan barang ini rasa gotong royong dan kebersamaan akan tercipta mas”. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 WIB)



Gambar 4.9 : Pengepakan barang oleh pengelola E-Warung

Sumber : Dokumen Pribadi Peneliti, 2018

Selain pengepakan barang yang dilaksanakan, ada juga pembagian laba dan tabungan per bulan. Dalam hasil usahanya, penyelia E-Warung menyisihkan sebagian hasil untuk tabungan kelompok per bulan. Tabungan ini digunakan untuk membantu anggota yang dalam kondisi sangat butuh bantuan, atau digunakan untuk membeli baju kelompok pada saat hari raya idul fitri.

“Untuk harapan yang akan dicapai ini juga banyak mas, program kan dibuat pasti akan ada tujuannya, manfaat dan harapan yang akan diperoleh untuk penerima bantuan ataupun pelaksanaan program E-Warung ini mas. Kalau untuk harapan ya, ini kan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui pemberian usaha dengan tujuan mengurangi kemiskinan. Harapan ya menambah ekonomi dari KPM agar yang tadinya tidak memiliki penghasilan jadi berpenghasilan. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Selanjutnya Mbak Hana selaku kordinator PKH Kota Batu memberikan harapan dengan adanya program E-Warung ini :

“Untuk harapan ya pasti kita berharap lebih mas dengan adanya program E-Warung ini. Salah satunya dengan berjalannya program ini bisa tambah modal mas. Program E-Warung supaya berjalan dan berkembang lebih baik lagi, yang nantinya jika berkembang lebih lagi bisa ditambah lagi barang-barang yang dijual di E-Warung mas. Selain itu bisa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan bermanfaat menambah pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari para anggota pengelola E-Warung mas. Jadi kurang lebih saya sebagai kordinator PKH berharapnya usaha yang dikembangkan oleh para pengelola E-Warung ini dapat dijadikan modal untuk menambah pendapatan dari masing-masing anggota”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Selanjutnya informasi yang diberikan oleh Ibu Sri Wahyuni selaku pengelola E-Warung Desa Beji Batu terkait dengan harapannya dengan adanya program E-Warung:

“Alhamdulillah mas senang sekali saya mas bisa dapat bantuan E-Warung ini. Saya yang dulunya hanya sebagai penjual jamu bisa mempunyai usaha tambahan apalagi ini dilakukan dengan cara bersama-sama kelompok PKH. Kelompok PKH pengelola E-Warung jadi lebih rukun dengan adanya program ini karena memang kan usaha dilakukan secara bersama-sama”. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 13.00 WIB)



Gambar 4.11: Wawancara peneliti dengan Ibu Sri Wahyuni
Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2018

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa harapan dengan adanya program E-Warung ini adalah bertambahnya penghasilan dari masing-masing anggota dengan usaha yang dilakukan secara bersama-sama ini. Dengan berkembangnya usaha yang dilakukan akan memberikan dampak positif untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari anggota kelompok dari pengelola E-Warung ini. Selain harapan dengan meningkatnya pendapat masyarakat anggota kelompok secara ekonomi juga meningkatkan secara sosial diantara anggota kelompok PKH pengelola E-Warung ini semakin meningkat karena memang program E-Warung ini laksanakan secara bersama-sama.

4) Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program E-Warung

Pelaksanaan program selalu melibatkan beberapa aktor untuk terciptanya program agar berjalan dengan baik. Program harus dilaksanakan dengan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya dengan

mengetahui wewenang atau tugas masing-masing yang ada di dalam pelaksanaan program tersebut. Hal ini menurut Ibu Lilik selaku kepala bidang pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial memberikan harapan terkait adanya program E-Warung ini bahwa:

“Pihak yang terlibat dalam program seperti E-Warung ini pasti banyak mas. Mulai dari pembuat kebijakan ataupun yang menerima kebijakan tersebut. Untuk E-Warung ini merupakan salah satu program dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dengan melakukan pemberdayaan pada KPM melalui pemberian usaha. Pembuatan program pastinya berasal dari pusat mas yaitu, Kementerian Sosial. Semua kegiatan atau program yang menyangkut pemberdayaan masyarakat miskin itu memang yang mengatur Kementerian Sosial yang nantinya akan dilimpahkan melalui Dinas Sosial yang ada di daerah. Untuk E-Warung ini Dinas Sosial Kota Batu menjadi rekomendasi awal untuk kelompok PKH yang pengelola E-Warung menerima bantuan dari Kementerian Sosial yang dilakukan melalui Dinas Sosial Kota Batu. Dinas Sosial Kota Batu memfasilitasi dari kelompok PKH pengelola E-Warung mas. Selain itu dari pihak kecamatan, kelurahan ataupun desa juga ikut terlibat dalam program ini karena memang untuk sampai ke Dinas Sosial harus ada persetujuan dari desa atau kelurahan untuk sampai ke Dinas Sosial. Nantinya kelompok PKH pengelola E-Warung ini akan dibantu oleh penyelia-penyelia yang telah ditunjuk untuk membantu dalam pelaksanaan program E-Warung ini mas. Jadi kita memang harus bersinergi dalam hal pemberdayaan masyarakat miskin ini supaya dapat berjalan dengan baik program ini mas”.

a. Pihak Pelaksanaan Program E-Warung

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program E-Warung menurut buku kajian awal pelaksanaan E-Warung ini adalah sebagai berikut:

a. Kementerian Sosial

Dalam pelaksanaan program tersebut Kementerian Sosial ini mempunyai tugas dan wewenang yaitu sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebijakan program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan melalui program E-Warung
 - 2) Melakukan sosialisasi/pembekalan program kepada pemangku kepentingan di tingkat nasional dan kota/kabupaten
 - 3) Memverifikasi usulan anggota PKH yang akan menjadi lokasi E-Warung
 - 4) Berkordinasi dengan pemangku kepentingan program di tingkat kota/kabupaten dan nasional
 - 5) Mempersiapkan keperluan dan perangkat teknis terkait peluncuran, misalnya tablet, dana pembangunan unit warung, dan data penerima KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) di pusat.
- b. Dinas Sosial Kota/Kabupaten
- 1) Membentuk Kube Jasa
 - 2) Mencari dan mengusulkan calon lokasi E-Warung
 - 3) Mempersiapkan proposal
 - 4) Memberi penjelasan mengenai program E-Warung kepada kelompok PKH yang terpilih untuk mengelolanya dan para pemegang KKS
- c. Bank: BNI/BRI (Pusat dan Daerah)
- 1) Bank berperan dalam memfasilitasi transaksi keuangan di E-Warung

- 2) Pada tingkat pusat, tugas bank adalah mencetak kartu, membuka rekening penerima manfaat dan menyediakan perangkat teknologi E-Warung
- 3) Pada tingkat daerah kota/kabupaten, bank bertugas untuk mengaktifkan kartu dan mencetak buku tabungan, mengedukasi operator E-Warung, dan menyelesaikan segala keperluan administrator terkait E-Warung sebagai agen bank dan penerima kartu.

d. Bulog

- 1) Bulog pusat dan daerah berkordinasi untuk menyediakan barang bagi E-Warung sesuai pesanan KMIS.

e. KMIS (Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera)

- 1) Pada tahap peresmian E-Warung, KMIS berperan dalam pemesanan barang ke Bulog
- 2) Ikut serta bersama Kemensos dan Dinsos melakukan sosialisasi/pembekalan kepada pelaksana program tingkat kabupaten/kota.

f. Kube Jasa

- 1) Kube Jasa berperan sebagaimana mestinya dalam mengelola E-Warung
- 2) Memberikan pelayanan kepada KPM dan yang ingin berbelanja di E-Warung

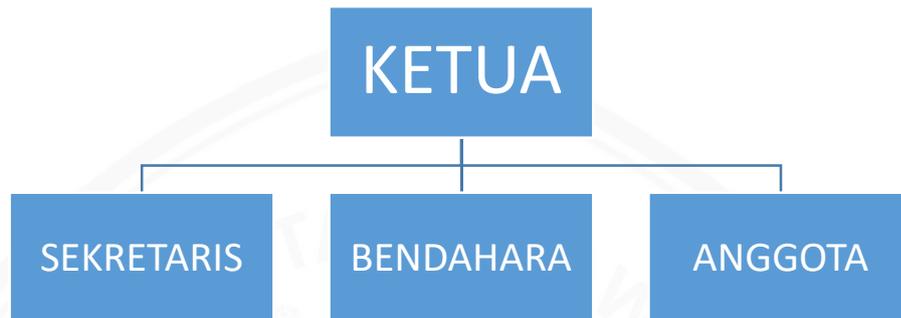
- 3) Berperan sebagai operator E-Warung dan terdaftar sebagai agen bank
- g. Camat, Lurah/Kepala Desa, Ketua RW/RT, dan Tokoh Masyarakat
- 1) Pihak-pihak ini berperan dalam membantu persiapan dan pelaksanaan peresmian E-Warung.
 - 2) Mengerahkan warga untuk bergotong royong membangun warung
- h. TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan)
- 1) TKSK bersama pendamping PKH kecamatan melakukan pendataan calon penerima KKS dan anggota Kube Jasa.
- i. Penyelia E-Warung
- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi program E-Warung
 - 2) Melakukan pendampingan sosial terhadap operator E-Warung
 - 3) Membuat laporan pelaksanaan E-Warung yang ada di lingkup kota/kabupaten.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi sangat diperlukan untuk mengarahkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan E-Warung. Struktur organisasi E- Warung yaitu sebagai berikut:

1. Ketua merangkap anggota

2. Sekretaris merangkap anggota
3. Bendahara merangkap anggota
4. Anggota.



Gambar 4.12 Struktur Organisasi E-Warung

Sumber: Dinas Sosial Kota Batu, 2017

c . Hak dan Kewajiban Anggota E-Warung

1) Hak Anggota E-Warung

Anggota kube memiliki hak-hak tertentu untuk dapat seluruh informasi dan proses kinerja E-Warung yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Memberikan saran untuk memperbaiki kinerja E-Warung.
2. Mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari pembagian hasil usaha jasa E-Warung.
3. Memperoleh informasi tentang perkembangan usaha E-Warung.
4. Ikut serta dalam pengambilan keputusan yang terkait E-Warung.
5. Memperoleh kebutuhan bahan pangan pokok melalui E-Warung.
6. Menjadi anggota koperasi; dan

7. Memanfaatkan semua fasilitas yang ada di E-Warung.

2) Kewajiban Anggota E-Warung

Untuk menjadi pengelola E-Warung, anggota diwajibkan untuk melaksanakan seluruh kewajiban yang telah ditentukan.

Kewajiban dari anggota E-Warung yaitu sebagai berikut :

1. Mengikuti dan menaati semua ketentuan yang telah disepakati baik aturan yang ada dalam E-Warung maupun koperasi.
2. Mewujudkan tujuan bersama yang telah ditetapkan.
3. Membangun kerja sama dengan berbagai pihak.
4. Memanfaatkan dana bantuan stimulan usaha ekonomi produktif dengan penuh tanggung jawab.
5. Membayar iuran kesetiakawanan sosial setiap bulan sesuai dengan kesepakatan bersama yang digunakan untuk kepentingan bersama.
6. Memelihara aset E-Warung Kube Jasa.

5) Sumber daya finansial yang digunakan dalam implementasi program E-Warung

Sumber daya finansial merupakan salah satu faktor terpenting dalam pelaksanaan atau implementasi program E-Warung. Adanya dana bantuan menjadi unsur utama dalam menunjang terlaksananya program E-Warung tersebut. Pelaksanaan program E-Warung terkait besaran dana yang diberikan kepada anggota PKH yang dipilih menjadi pengelola E-

Warung pada dasarnya sama. Untuk program E-Warung ini masing-masing E-Warung akan mendapat dana bantuan sebesar Rp.30.000.000,00. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bu Lilik Selaku Kepala Bagian Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa:

“Dana untuk program E-Warung ini diperoleh dari Kementerian Sosial yang memang asalnya dari pusat mas. Memang yang digunakan ialah dana APBN yang memang sudah tercantum dalam peraturan yang ada. APBN digunakan untuk memberikan bantuan dana yang diberikan kepada kelompok penerima E-Warung mas. Untuk program E-Warung tidak memakai dana APBD mas, jadi kita hanya menggunakan dana untuk pelaksanaan program E-Warung ini dari pusat”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Selanjutnya menurut Mbak Hana selaku kordinator PKH Kota Batu menyatakan tentang sumber daya finansial yang digunakan dalam program E-Warung ialah:

“Untuk dana atau sumber daya yang dikeluarkan untuk program yang dibentuk oleh pemerintah pusat pasti dana atau sumber daya finansialnya dapat atau diperoleh juga dari pusat mas. Kalau sumber daya dari pusat ya APBN mas untuk program E-Warung ini memang dana diperoleh dari Kementerian Sosial. Untuk keuangan yang berasal dari daerah atau APBD tidak ada mas untuk program E-Warung ini”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Selanjutnya menurut Mbak Nana selaku penyelia E-Warung Desa Songgokerti menyatakan tentang sumber daya finansial yang digunakan dalam program E-Warung ialah:

“Setiap E-Warung mendapat dana sebesar 30 juta mas, bantuan dana yang ada diberikan saat di awal saja, jadi tidak seterusnya mas. Kemudian dana ini dibagi menjadi dua mas, yang 10 juta digunakan untuk pembangunan fisik E-Warung serta membeli perlengkapan E-Warung seperti pengepres, timbangan dan 20 juta digunakan untuk modal usaha seperti membeli beras, gula, telur dan yang

lainnya mas". (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Sesuai dengan pernyataan dari wawancara narasumber daya finansial yang digunakan dalam program E-Warung dapat disimpulkan bahwa dana yang digunakan berasal dari pusat. Sumber dana finansial atau dana yang digunakan dalam menurunkan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin bersumber dari dana APBN Kementerian Sosial Republik Indonesia yang dilakukan melalui Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Hibah dalam negeri. Setiap E-Warung mendapat bantuan dana Rp. 30.000.000, dana bantuan diberikan pada saat awal saja dan digunakan sebagai modal usaha dan pembangunan fisik kios E-Warung.

b. Konteks Implementasi

1) Strategi aktor yang terlibat dalam implementasi program E-Warung

Implementasi dalam suatu program agar mencapai tujuan yang diinginkan, diperlukan suatu strategi yang digunakan. Pelaksanaan program E-Warung ini pastinya memerlukan strategi yang digunakan agar tujuan-tujuan dari program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Strategi yang diterapkan bermanfaat untuk membuat pelaksanaan program berjalan dengan baik, yang mulai dari perencanaan ataupun serta dapat melakukan pelaksanaan dengan prosedur yang jelas.

Strategi yang digunakan terkait dengan program E-Warung terdapat strategi yang diterapkan dari masing-masing aktor yang terlibat dalam implementasi program E-Warung. Menurut Ibu Lilik selaku kepala bidang pemberdayaan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kota Batu terkait agar tercapainya pelaksanaan program yang baik:

“Strategi yang digunakan oleh Dinas Sosial sendiri selaku pelaksana program E-Warung pastinya ada mas. Untuk hal strategi kita sendiri sebagai pihak yang terlibat berusaha melakukan pembinaan ataupun memberikan pengarahan yang baik dan rutin terhadap penyelia-penyelia E-Warung yang sudah ditunjuk. Masing-masing penyelia harus tau apa tugas dan fungsinya. Sehingga jika pada saat pendampingan kelompok usaha E-Warung, penyelia tau apa yang harus mereka lakukan. Jadwalnya harus jelas soalnya kan namanya pengarahan kan dilakukan butuh waktu juga mas”. ((Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Lebih lanjut lagi Mbak Hana selaku kordinator PKH Kota Batu memberikan keterangan terkait dengan strategi yang dilakukan oleh aktor terkait dengan pelaksanaan program E-Warung:

“Banyak mas strategi kami dalam pelaksanaan program E-Warung ini. Soalnya ya namanya strategi itu digunakan untuk memperlancar pelaksanaan program agar berjalan dengan baik. Strategi harus dilaksanakan secara perlahan mas tapi bisa sampai. Maksudnya kami di Dinas Sosial ini mencoba untuk melakukan strategi dengan melaksanakan pendekatan terhadap penyelia dari masing-masing E-Warung. Dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat miskin diharapkan akan terciptanya situasi program yang baik kedepannya. Jadi pendekatan pemberdayaan masyarakat digunakan untuk dapat melaksanakan program dengan baik dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dana anggota kelompok pengelola E-Warung agar dapat bermanfaat lagi mas untuk kebutuhan jangka panjang”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Penyelia para anggota pengelola E-Warung juga mempunyai strategi agar program E-Warung ini dapat berjalan dengan baik. Penyelia

mempunyai peran cukup penting dalam pelaksanaan program E-Warung ini karena memang penyelia yang mengetahui situasi yang terjadi di E-Warung dan bagaimana hubungan langsung pengelola dengan E-Warung dalam melaksanakan usahanya. Wawancara selanjutnya ini digunakan untuk mengetahui strategi yang diterapkan dalam implementasi program E-Warung ini, Mbak Nana selaku penyelia E-Warung Desa Songgokerto memberikan pendapat yaitu:

“Yang saya gunakan untuk strategi anggota kelompok pengelola E-Warung ini mas yaitu saya memberikan penjelasan dengan kepada para anggota. Jadi untuk melakukan pendekatan saya harus menjelaskan secara pelan-pelan mas. Kan ada pertemuan kelompok, itu biasanya saya akan melakukan evaluasi hal apa saja yang sudah dikerjakan selama satu bulan ini dan rencana kedepan untuk mengembangkan E-Warung ini. Biasanya rapat pertemuan ini dilakukan sebulan sekali dan dilaksanakan di rumah ketua kelompok pengelola E-Warung mas. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 WIB)

Pada kesempatan lain yang Ibu Anik selaku penyelia E-Warung Desa Beji juga memberikan informasi terkait dengan strategi yang digunakan dalam program E-Warung :

“Kalau saya mas sebagai penyelia sendiri punya strategi misalnya melakukan yaitu menghubungi apa datang langsung ke rumahnya mas. Jadi untuk meningkatkan kesadaran dari masing-masing anggotan saya coba untuk mendatangi anggota yang jarang datang saat melakukan pertemuan mas. Selain itu juga ada pembagian untuk menjaga E-Warung mas, jadi nanti jadwal menjaga E-Warung akan dibagi ke masing-masing anggota mas. Setiap minggu masing-masing anggota akan menjaga E-Warung sebanyak dua kali, hal ini agar kegiatan di dalam E-Warung lebih efektif dan lebih menolong anggota E-Warung yang memiliki pekerjaan lain. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 12.00 WIB)

Implementasi program E-Warung ini dapat berjalan seperti tujuan dan dapat berjalan dengan baik memang diperlukan strategi-strategi yang dilakukan oleh pihak yang terlibat di dalam program tersebut. Masing-masing aktor dan instansi yang terkait mempunyai strategi tersendiri agar tujuan dari program E-Warung ini dapat tercapai dengan baik serta dapat memberikan manfaat bagi masing-masing anggota kelompok pengelola E-Warung.

2) Tanggapan yang diberikan para anggota pelaksana program E-Warung

Adanya suatu program pasti akan menimbulkan tanggapan dari penerima program. Akan banyak tanggapan yang diberikan masyarakat khususnya penerima bantuan yaitu kelompok penerima program E-Warung ini. Tanggapan-tanggapan dari berbagai pihak yang terlibat dalam program E-Warung ini. Menurut Mbak Nana selaku penyelia E-warung Desa Songgokerto memberikan informasi terkait dengan tanggapan diberikan para anggota pelaksana program E-Warung ialah:

“Tanggapan dari masing-masing terkait bantuan E-Warung ini sangat positif mas. Kan memang pada awalnya mengajukan usulan dulu ke Dinas Sosial, kemudian belum tau akan disetujui apa tidak. Setelah disetujui untuk diberi dana bantuan pasti senang sekali. Ya kan memang dikasih dana bantuan untuk usaha pasti senang mas. Apalagi dananya digunakan untuk kegiatan bersama-sama pasti senang mas. Tapi ya memang untuk pertama kali awal-awal bulan dalam pengelolaan E-Warung pasti ada kesalahpahaman dari masing-masing anggota, karena pada saat awal masih proses menyesuaikan program E-Warung”. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 WIB)

Selanjutnya pendapat dari Ibu Lilik selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial memberikan tanggapan yang diberikan anggota pelaksana program E-Warung ialah:

“Tanggapan dari penerima bantuan pastinya sangat senang mas, karena memang sedikit banyak dapat dibantu dengan adanya program E-Warung ini. Dengan adanya program E-Warung ini istilahnya ada harapan baru mas untuk para penerima program bantuan ini dalam menambah penghasilan mereka sehari-hari. Jadi yang memang ada penghasilan tambahan mas dengan adanya usaha bersama ini. Yang awalnya mereka kebanyakan hanya sebagai ibu rumah tangga atau mempunyai pekerjaan masing-masing, dengan adanya program E-Warung ini mereka jadi memiliki penghasilan. Ya memang membantu mas karena sifatnya seperti tabungan mas. Dan mereka semua siap mas dalam menerima bantuan dan insyaallah bisa bertanggung hawa dengan apa yang telah dipercayakan kepada mereka untuk dikembangkan lagi”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Ibu Sri Wahyuni selaku anggota pengelola E-Warung Desa Beji memberikan tanggapan terkait penerima program E-Warung ialah sebagai berikut:

“Saya sangat senang sekali mas menerima bantuan program E-Warung ini. Kan namanya orang susah memerlukan diberi bantuan yang sifatnya untuk kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama-sama pastinya sangat senang. Apalagi dulu sebelum menerima program saya hanya memiliki penghasilan dari menjual jamu keliling mas, sekarang saya bisa memiliki penghasilan tambahan dengan adanya program E-Warung ini. Bisa digunakan untuk membayar sekolah anak mas. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 12.00 WIB)

c. Hasil Kebijakan

1) Dampak dalam pelaksanaan program E-Warung

a. Dampak tidak terlihat (outcome)

Program E-Warung ini diharapkan mampu memberikan perubahan yang baik untuk penerima program tersebut. Program E-Warung mempunyai tujuan yaitu pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan kemampuan anggota kelompok pengelola E-Warung di dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Harapan dengan adanya program E-Warung ini dapat meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan kualitas sandang, pangan, papan, peningkatan kesehatan ataupun tingkat pendidikan dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan lainnya.

Selain dengan adanya perubahan, suatu program diharapkan mampu memberikan dampak terhadap penerima program. Dampak yang diberikan oleh program bisa berupa dampak yang tidak terlihat atau disebut dengan *outcome*. Dampak tidak terlihat maksudnya merupakan dampak tersebut tidak terlihat namun dapat dirasakan oleh penerima dan orang-orang sekitarnya. Program E-Warung juga memberikan dampak kepada pengelola E-Warung ataupun para penyelia E-Warung. Mbak Nana selaku penyelia E-Warung Desa Songgokerto yang memberikan pendapatnya mengenai dampak program E-Warung ini dalam pemberdayaan masyarakat miskin ialah:

“Dampak yang dihasilkan dalam suatu program pasti ada mas, contohnya program E-Warung ini yaitu dengan adanya program ini yang dulu para penerima anggota PKH yang tidak saling begitu akrab dan kenal mas karena sibuk dengan pekerjaan sendiri, dengan adanya program E-Warung ini dalam satu kelompok bisa akrab. Karena memang adanya gotong royong dan kerjasama mas kalau program E-Warung ini berjalan, ya mereka akan bekerja bersama-

sama agar program ini tetap ada. Jadi ya kerjasama antar anggota E-Warung ini semakin meningkat mas, jadi ya semakin enak untuk kedepannya dalam pelaksanaan program E-Warung untuk kedepannya dalam pelaksanaan program ini mas”. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 WIB)

Kemudian Ibu Sri Wahyuni selaku ketua E-Warung Desa Beji juga memberikan pendapatnya terkait dengan dampak yang diterima dengan adanya program E-Warung:

“Kalau dampak ya menurut saya mas adanya E-Warung ini dapat meningkatkan kesadaran dari masing-masing anggota untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Seperti E-Warung kelompok saya kan ini setiap anggota harus melaksanakan tugas piket menjaga E-Warung sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sebelumnya.” (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 12.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program E-Warung ini memberikan dampak yang tidak terlihat atau *outcome* bagi penerima bantuan yang ada pada masing-masing kelompok E-Warung. Dampak tersebut dapat dirasakan juga oleh penyelia program E-Warung selaku aktor yang intensitas pertemuan dengan kelompok penerima bantuan E-Warung. Selain itu dampak yang tidak terlihat yaitu dapat meningkatkan kerjasama dan gotong royong dari masing-masing anggota dalam melaksanakan program E-Warung ini. Anggota kelompok pengelola E-Warung, dalam hal kerjasama dan gotong royong dapat meningkat dengan adanya program E-Warung.

b. Dampak terlihat (output)

Selain dampak tidak terlihat, ada juga dampak yang terlihat yang diberikan melalui program E-Warung yang dapat dirasakan oleh anggota

pengelola E-Warung. *Output* ini merupakan dampak yang dapat terlihat atau dilihat secara nyata oleh anggota pengelola E-Warung serta masyarakat yang ada disekitar. Hal ini disampaikan oleh Mbak Nana selaku penyelia E-Warung Desa Songgokerto yang menyampaikan pendapat mengenai dampak terlihat dengan adanya program E-Warung ini adalah:

“Ada mbak pasti dampaknya, masyarakat yang ikut program E-Warung ini semakin dibantu dengan program pemberdayaan ini. Karena memang sifatnya bantuan ya membantu misalnya menambah penghasilan dengan adanya keuntungan melalui penjualan di E-Warung”. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 WIB)

Selanjutnya menurut pendapat dari Ibu Sri Wahyuni selaku ketua E-Warung Desa Beji memberikan pendapat dampak terlihat dari adanya program E-Warung ini ialah:

“Dampak yang saya rasakan adalah saya jadi memiliki penghasilan mas, soalnya saya selama ini hanya sebagai ibu rumah tangga, dengan adanya program ini saya bisa menambah penghasilan dari suami saya, dan bisa menambah penghasilan perbulannya untuk digunakan keperluan sehari-hari”. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 12.00 WIB)

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa kesimpulan dari dampak terlihat dari adanya program E-Warung ini untuk penerima bantuan E-Warung ini ialah pendapatan mereka meningkat dengan usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Usaha bersama yang dilakukan menambah penghasilan dari masing-masing anggota pengelola E-Warung. Beberapa anggota juga mempunyai pekerjaan utama dan

melalui usaha bersama ini digunakan untuk menambah penghasilan dari masing-masing anggota E-Warung.

2) Perubahan yang diperoleh anggota dalam pelaksanaan E-Warung

Suatu program agar mampu memberikan perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Perubahan yang baik dapat diartikan dengan bertambah baiknya keadaan masyarakat dari sebelum ada program dengan sesudah ada program tersebut dilaksanakan. Perubahan yang lebih baik ini juga menjadi indikator program tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak. Program E-Warung ini mempunyai tujuan untuk memberikan dampak yang baik dalam penanggulangan kemiskinan masyarakat yang dilakukan melalui proses pemberdayaan. Program E-Warung ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama. Tentang perubahan yang diterima oleh pengelola E-Warung di Kota Batu, Ibu Lilik selaku Kepala Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Batu yaitu sebagai berikut:

“Program E-Warung ini dibentuk untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin yang dilakukan secara kelompok. Anggota kelompok pengelola E-Warung ini terdiri dari beberapa orang yang tinggal dalam satu ruang lingkup wilayah, yang jaraknya masih di satu desa atau kelurahan yang sama. Mereka mempunyai pekerjaan utama berbeda-beda tapi dengan adanya program E-Warung ini akan mempunyai kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama-sama”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Pada pelaksanaan program E-Warung ini dapat dikatakan berhasil jika memberikan dampak ataupun perubahan yang baik bagi para penerima atau para anggota pengelola E-Warung yang melaksanakan program E-Warung ini. Pemberian bantuan dana pada kelompok yang dibentuk dan dilaksanakan akan membantu dalam proses pelaksanaan program E-Warung tersebut. Dana bantuan yang diberikan pada awal pelaksanaan program akan dibelanjakan untuk pembentukan E-Warung dan sebagai modal dari E-Warung tersebut. Kegiatan usaha bersama ini yang mendasari perubahan yang terjadi di dalam kelompok di masing anggota yang ada. Perubahan yang dihasilkan oleh program E-Warung ini terhadap masyarakat diharapkan dapat memperbaiki kondisi sosial anggota pengelola E-Warung. Hal ini sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh Mbak Nana selaku penyelia E-Warung yaitu:

“Pelaksanaan program E-Warung ini mas memang memberikan dampak perubahan yang baik untuk para anggota pengelola E-Warung. Usaha bersama ini dijadikan sebagai usaha sampingan disamping usaha utama yang dilakukan anggota E-Warung seperti buruh tani, berjualan jamu, hal ini dilakukan untuk menambah pendapatan ekonomi dari anggota pengelola E-Warung ini”. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 WIB)

Perubahan sebelum dan sesudah adanya program E-Warung ini pada dasarnya ada perbedaan. Sebelum adanya program E-Warung ini beberapa anggota kelompok E-Warung tidak memiliki pekerjaan dan hanya sebagai ibu rumah tangga, hal ini memberikan perubahan yang baik dalam peningkatan pendapatan dari anggota pengelola E-Warung. Selanjutnya hal yang lain disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuni ketua E-

Warung desa Beji memberikan informasi terkait perubahan dengan adanya program E-Warung:

“Dengan adanya program E-Warung ini perubahan masyarakat semakin akrab satu sama lain. Keadaan sosial menjadi lebih baik dengan adanya E-warung ini karena memang kan pasti ada komunikasi dalam kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama. Sebelum adanya program E-Warung ini anggota E-Warung yang satu desa jarang untuk berkomunikasi, setelah adanya E-Warung ini kami menjadi semakin akrab satu sama lain mas”. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 12.00 WIB)

Tabel 4.4 Perubahan Sebelum dan Sesudah Ada E-Warung

No.	Jenis Perubahan	Sebelum	Sesudah
1.	Bahan Pangan	Melakukan kerjasama dengan pihak Bulog sebagai supplier bahan pangan.	Tidak bekerjasama dengan pihak bulog, karena kualitas bahan pangan seperti beras cenderung, buruk, sehingga beralih menggunakan beras milik koperasi dengan kualitas baik/premium.
2.	Penyaluran Bantuan	Penyaluran bantuan berupa bahan pangan murah bagi peserta bantuan sosial.	Penyaluran bantuan sosial dilakukan secara non tunai berupa dana sebesar Rp.110.000 ribu, bagi peserta, yang nantinya dipergunakan untuk membeli bahan pangan yang telah disediakan.
3.	Pendapatan Pengelola	Sebelum adanya E-Warung tidak memiliki penghasilan dan hanya sebagai rumah tangga.	Setelah menjadi pengelola E-Warung memiliki penghasilan per bulan.

4.	Pembayaran Perbankan	Hanya bisa melakukan transaksi dengan agen yang bekerjasama dengan bank BNI dan BRI	Menambah pilihan dalam pembayaran perbankan, karena di E-Warung menyediakan seluruh keperluan peserta KPM.
5.	Lokasi	Lokasi yang sulit dijangkau oleh peserta KPM, karena tidak strategis.	Lokasi yang mudah dijangkau oleh peserta KPM, karena telah dilakukan survei terhadap lokasi yang akan dijadikan tempat E-Warung.

Sumber: Hasil Temuan Lapangan Tahun 2018

2) Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program E-Warung

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang membuat pelaksanaan atau implementasi dari adanya program E-Warung ini dalam pemberdayaan masyarakat miskin dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan program tersebut. Faktor-faktor yang mendukung dalam implementasi program E-Warung berdasarkan fakta yang ada di lapangan mengungkapkan bahwa ada faktor yang mendukung terjadinya pelaksanaan program E-Warung ini yaitu 1) Adanya koordinasi yang baik antara aktor yang terlibat di dalam program E-Warung, 2) Adanya evaluasi dan layanan pengaduan yang disediakan oleh E-Warung, 3) Adanya ketepatan sasaran yang ditunjukkan oleh program E-Warung dengan ketentuan yang berlaku. Penjelasan secara rinci dengan wawancara atau informasi yang peneliti laksanakan ialah sebagai berikut:

1) Adanya koordinasi yang baik antara aktor yang terlibat di dalam program E-Warung

Program E-Warung diharapkan mampu berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan awal dari program. Adanya koordinasi yang baik antara yang terlibat di dalam program E-Warung merupakan faktor pendukung yang dianggap penting dalam pelaksanaan program E-Warung ini. Implementasi program E-Warung dilakukan koordinasi ataupun komunikasi yang baik dijalankan oleh aktor ataupun instansi yang terlibat didalamnya. Adanya koordinasi yang rutin dilaksanakan agar pelaksanaan program E-Warung ini dapat berjalan dengan baik hal ini sesuai dengan pendapat dari Mbak Nana selaku penyelia E-Warung:

“Salah satu faktor pendukung dalam program E-Warung ini adalah adanya koordinasi yang baik dari pihak terkait. Misalnya mas dari pihak Dinas Sosial dan penyelia sudah melakukan pertemuan dengan tujuan pengarahan yang dilaksanakan. Tujuannya agar masing-masing dari pendamping ini mengetahui tugasnya sebagai penyelia masing-masing E-Warung. Dengan adanya koordinasi yang baik di dalam penyelia nanti akan tersalurkan komunikasi juga antar anggota E-Warung dan penyelia terutama dalam pelaksanaan program yang dilakukan.” (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 WIB)



Gambar 4.13: Sosialisasi oleh Dinas Sosial

Sumber: Dinas Sosial Kota Batu Tahun 2017

Selanjutnya menurut pendapat dari Mbak Hana selaku kordinator PKH ini menyatakan bahwa:

“Komunikasi menjadi faktor pendukung mas terhadap program E-Warung ini. Para penyelia yang ada mulai dari E-Warung kecamatan hingga sampai E-Warung perdesaan berusaha untuk melaksanakan program dengan baik. Apalagi untuk program ini mas komunikasi yang dilaksanakan oleh penyelia dan para anggota pengelola E-Warung ini menurut saya sudah baik karena memang didalamnya ada kerja sama yang baik”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Menurut Ibu Lilik selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Di Dinas Sosial Kota Batu ini menyatakan bahwa:

“Faktor pendukung pasti selalu ada ya mas. Ya seperti kalau menurut saya kerjasama kita dengan para penyelia yang sudah ditunjuk oleh Dinas Sosial. Kami terkadang melaksanakan pertemuan untuk melaksanakan kegiatan membahas tentang pendampingan dari kelompok penerima program E-Warung ini. Harapan kami cuma satu mas, agar para kelompok penerima ini dapat menjalankan program sesuai dengan tugas dan fungsinya

masing-masing”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan program E-Warung ini dibutuhkan kordinasi, kerjasama dan komunikasi yang baik antar aktor atau pihak yang terkait dengan pelaksanaan program. Implementasi program dapat berjalan dengan baik jika masing-masing aktor yang terlibat mengetahui peranan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang ditetapkan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program E-Warung dapat berjalan dengan tujuan yang diharapkan.

2) E-Warung sebagai titik pendistribusian bantuan sosial non tunai

Faktor pendukung yang lainnya dalam implementasi program E-Warung agar dapat berjalan dengan baik yaitu E-Warung sebagai titik distribusi program bantuan sosial non tunai. Melalui faktor pendukung ini E-Warung tidak akan kehilangan pembeli, karena pembeli sudah ada yaitu salah satunya para penerima program BPNT. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa program E-Warung mempunyai muatan ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat miskin yaitu KPM. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Bu Lilik yang selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Di Dinas Sosial Kota Batu yang menyatakan bahwa:

“Program E-Warung ini ada salah satunya untuk memudahkan pencairan bansos non tunai atau disebut BPNT mas. E-Warung memiliki fungsi untuk melayani pencairan bansos non tunai yang

didapat setiap bulan mas, dan juga melayani penjualan bahan pangan pokok murah bagi penerima bansos. Jadi bisa dikatakan bahwa E-Warung sebagai titik pendistribusian bantuan sosial non tunai mas”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Selanjutnya pendapat dari Mbak Nana selaku penyelia E-Warung

Desa Songgokerto:

“Melalui E-Warung ini mas, para penerima program BPNT yang setiap bulan mendapat bantuan dana sebesar 110.000 ribu, dapat mencairkan dana yang ada menjadi bahan pangan pokok di E-Warung ini mas. Jadi kalau dulu para penerima bantuan BPNT harus mengantri dulu untuk mencairkan dana nya di balai desa masing-masing dan terbatas dengan waktu yang ada. Dengan adanya E-Warung ini, mereka tidak perlu mengantri dan dapat mencairkan dana yang ada sewaktu-waktu di E-Warung yang terdekat mas”.

3) Ketepatan sasaran yang ditunjukan oleh program E-Warung dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan program pastinya harus sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh oleh para penerima bantuan E-Warung ini. Manfaat yang diperoleh oleh penerima bantuan harus sesuai dengan sasaran yang tepat untuk para penerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Ibu Lilik selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Di Dinas Sosial Kota Batu memberikan pendapatnya tentang faktor pendukung dari E-Warung ini:

“Program E-Warung ini prosesnya cukup panjang mas karena kan memang program dari pusat, jadi kita harus saling kordinasi dengan pihak pusat mas. Untuk program E-Warung ini sudah tepat sasaran mas karena memang kita langsung turun ke lapangan untuk meninjau kelayakan penerima program E-Warung ini. Jadi ya program E-Warung ini memang sudah tepat sarannya mas”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)



Gambar 4.14: Survey lokasi E-Warung oleh Dinas Sosial

Sumber: Dinas Sosial Kota Batu Tahun 2017

Selanjutnya pendapat lain disampaikan oleh Mbak Hana selaku kordinator PKH ini menyatakan bahwa:

“Dalam program E-Warung ini adanya survey lapangan mas, jadi memang kita langsung ke lokasi untuk melihat keadaan penerima bantuan E-Warung ini. Hal ini nantinya untuk mengetahui apakah mereka layak untuk menerima bantuan dan bisa mengelola E-Warung atau tidaknya mas. Ya jadi memang tepat sasaran mas program E-Warung ini”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Kesimpulan wawancara yang telah dilakukan peneliti bahwa salah satu faktor pendukung program E-Warung ialah adanya ketepatan sasaran yang ditunjukkan oleh program E-Warung dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini memang salah satu penunjang adanya keberhasilan program E-Warung dan memanfaatkan program E-Warung ini dengan baik. Implementasi program E-Warung ini menurut informasi yang diperoleh para narasumber memang dalam hal pemberian bantuan ini tepat sasaran.

Jadi memang bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu terutama dalam hal finansialnya.

b. Faktor Penghambat

Selain adanya faktor pendukung dalam pelaksanaan program E-Warung ini juga ada faktor penghambat dalam implementasi program E-Warung ini. Faktor penghambat merupakan faktor yang membuat pelaksanaan program E-Warung ini sedikit terhambat dalam hal kelancarannya. Faktor penghambat pelaksanaan program E-Warung ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Peneliti sudah melakukan penelitian di lapangan dan menemukan ada tiga hal yang menghambat pelaksanaan program E-Warung yaitu 1) Kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program E-Warung, 2) Kurangnya sosialisasi dan tidak adanya buku pedoman yang mengatur tentang E-Warung, 3) Kurangnya konsistensi dari Pemerintah Pusat dalam mengatur kebijakan tentang program E-Warung. Penjelasan lebih rinci tentang faktor penghambat dapat diketahui sebagai berikut ini:

1) Kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program E-Warung

Sumber daya manusia menjadi pokok utama dalam pelaksanaan suatu program. Pelaksanaan program E-Warung juga membutuhkan sumber daya manusia yang baik untuk pelaksanaan program. Sumber daya manusia ini yang mempengaruhi pelaksanaan dari program E-

Warung. Penerima bantuan dari program E-Warung ini adalah para anggota PKH dan para anggota PKH merupakan masyarakat kurang mampu atau bisa dikatakan miskin, jadi memang sumber daya manusianya masih rendah. Hal ini selaras dengan pernyataan dari masing-masing narasumber. Selanjutnya Ibu Lilik selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Di Dinas Sosial Kota Batu memberikan pendapatnya tentang faktor penghambat dari E-Warung ini:

“Faktor penghambat kalau menurut saya tahu di lapangan mungkin tingkat kualitas manusianya mas. Untuk mengelola E-Warung ini kan tidak mudah mas, pengelola harus bisa mengelola modal yang ada untuk menjadi keuntungan, dan mengatur pengeluaran pemasukan serta menerima pembeli dari penerima BPNT dengan mesik gesek elektronik yaitu mesin EDC (*Electronic Data Capture*) . Mayoritas anggota pengelola E-Warung merasa kesusahan untuk menggunakan mesin EDC ini dan mengatur pembukuan, kesusahan ini juga disebabkan karena kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ada. Inilah salah satu faktor yang menghambat proses pelaksanaan program E-Warung”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Kemudian pendapat lain disampaikan oleh Mbak Nana selaku penyelia E-Warung tentang faktor pelaksanaan E-Warung:

“Kalau menurut saya mas faktor penghambatnya adalah kesadaran dari masing-masing anggota kelompok itu kurang tanggap. Dengan kata lain responnya kurang mas dalam menghadapi permasalahan yang ada dikelompok. Jika ada masalah dikelompok itu tidak segera diselesaikan tapi menunggu anggota yang lain seperti ketua kelompok untuk bertindak, padahal kan keseluruhan anggota harus tau masing-masing tugasnya jadi ya kesadaran harus selalu ditingkatkan mas”. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 WIB)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan program E-Warung ialah masih

kurangnya kualitas manusia atau anggota kelompok yang mengelola E-Warung tersebut. Kurangnya kualitas dari anggota ditandai dengan kesusahannya anggota pengelola dalam mengoperasikan mesin EDC, kesusahan anggota berkaitan dengan penggunaan teknologi terkini. Selain itu juga kurangnya kesadaran anggota dalam melaksanakan program E-Warung ini seharusnya dapat ditingkatkan karena dalam hal ini merupakan salah satu faktor penghambat E-Warung.

2) Kurangnya sosialisasi dan tidak adanya buku pedoman yang mengatur tentang E-Warung

Pelaksanaan suatu kegiatan dalam suatu program pastinya dari awal terbentuknya pasti ada yang namanya sosialisasi yang bersumber dari buku pedoman. Sosialisasi dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana runtutan atau tatacara dari kegiatan program yang akan dilaksanakan. Buku pedoman berguna untuk menjadi acuan dari suatu program yang ada. Menurut Mbak Nana sebagai penyelia E-Warung Desa Songgokerto memberikan pendapat tentang faktor penghambat:

“Memang mas di dalam program ini ada faktor penghambat salah satunya informasi yang diberikan oleh dinsosnya kurang menyeluruh mas, jadi ya ada beberapa informasi yang belum jelas yang didapatkan oleh anggota E-Warung yang lain. Selain itu juga penyelia tidak memiliki pedoman khusus dalam pendampingan di E-Warung yang ada”. (Wawancara pada 15 Maret 2018 pada pukul 09.00 WIB)

Kemudian pendapat lain dari Ibu Lilik selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial memberikan pendapat terkait faktor penghambat program E-Warung ini:

“Kalau faktor penghambat mas menurut pendapat saya banyak mas faktor yang mempengaruhi. Kurangnya sosialisasi program ini membuat anggota pengelola E-Warung dan penyelia menjadi bingung dalam mengelola E-Warung yang ada pada awal-awal pengelolaan mas. Selain itu kami dari Dinas Sosial yang ada tidak diberikan oleh pemerintah pusat buku pedoman dalam mengelola E-Warung ini tidak seperti program-program yang lain. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan program E-Warung”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

3) Kurangnya konsistensi dari Pemerintah Pusat dalam mengatur kebijakan tentang program E-Warung.

Program E-Warung adalah program yang berasal dari pemerintah pusat dan segala kebijakan bersumber dari pemerintah pusat. Implementasi dalam E-Warung sangat bergantung dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah kurang konsisten dalam mengatur kebijakan yang ada tentang E-Warung, banyak kebijakan yang berubah seiring diimplementasikan E-Warung sejak tahun 2016 lalu. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Lilik selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial memberikan pendapat terkait faktor penghambat program E-Warung ini:

“Konsistensi pemerintah itu mas salah satunya yang menjadi kendala, pada awalnya yang melayani pembelian dari penerima BPNT adalah E-Warung, namun seiring berjalannya waktu tidak hanya E-Warung, agen BNI diperbolehkan melayani penerima BPNT. Padahal agen BNI adalah milik perorangan mas, dimana

tujuan pengetasan kemiskinan dapat dilakukan kalau agen BNI diperbolehkan”. (Wawancara pada 19 Februari 2018 pada pukul 14.00 WIB)

Dari kesimpulan wawancara diatas diketahui bahwa memang ada beberapa faktor penghambat yang dialami dalam pelaksanaan program E-Warung ini salah satunya ialah terkait konsistensi pemerintah pusat dalam mengatur dan membuat kebijakan tentang program E-Warung. Pada awal pembentukan program E-Warung, para penerima BPNT hanya dapat menggunakannya di E-Warung, namun seiring berjalannya waktu pemerintah membuat kebijakan jika agen BNI diperbolehkan melayani para penerima BPNT. Hal inilah yang menjadi penghambat dari tercapainya tujuan dari adanya program E-Warung yaitu pengentasan kemiskinan.

C. Analisis Data dan Pembahasan

1. Implementasi Program E-Warung dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Program E-Warung merupakan salah satu dari program pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yang dirancang sebagai program nasional yang dibentuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bagian ketiga pasal 12 ayat 1 bahwa program E-Warung ini diimplementasikan sebagai upaya pemberdayaan sosial yang dimaksudkan untuk:

- a. Memberdayakan seorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya.
- b. Meningkatkan peran serta lembaga dan atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam mengelola penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada program ini kebutuhan yang dapat dipenuhi merupakan kebutuhan yang sifatnya kebutuhan mandiri tapi melalui usaha dapat dilakukan secara bersama-sama. Program E-Warung ini merupakan program pemberdayaan masyarakat miskin dalam rangka pengentasan kemiskinan para keluarga penerima manfaat yang berkaitan dengan pemberian modal atau bantuan dana untuk kegiatan usaha E-Warung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada pasal 12 ayat 3 bahwa program E-Warung ini merupakan pengimplementasian dari pemberdayaan sosial yang dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian motivasi, pelatihan ketrampilan, pendampingan, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, penataan lingkungan dan bimbingan lanjut. Program E-Warung ini sudah dilaksanakan hampir diseluruh provinsi yang ada di Indonesia termasuk salah satunya ialah Jawa Timur. Salah satu daerah di Jawa Timur yang mendapat bantuan program E-Warung ialah Kota Batu.

Program E-Warung ini merupakan program pemberdayaan masyarakat miskin dengan pemberian bantuan dana dalam pelaksanaan

usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Program E-Warung ini mencerminkan dari sifat-sifat sosial yaitu pelaksanaan suatu program usaha yang bukan hanya dilakukan oleh perseorangan tetapi dilakukan dengan cara bersama-sama dengan bukan mementingkan kepentingan individu tetapi kepentingan banyak orang. Melalui E-Warung ini juga merupakan program pemberdayaan yang didalamnya ada pendampingan yang dilakukan oleh pendamping-pendamping yang sudah ditunjuk. Program E-Warung ini juga merupakan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan terhadap masyarakat miskin dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh Kementerian Sosial. Adanya program E-Warung ini diharapkan masyarakat miskin dapat melakukan usaha yang sifatnya dilakukan secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan dari masing-masing anggota yang ada.

Joko Widodo (2007:85-86), “Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber termasuk manusia, dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta”, sehingga dapat dikatakan inti dari implementasi adalah kegiatan untuk menyalurkan atau memberikan hasil dari suatu kebijakan agar dapat mewujudkan tujuan utama dari kebijakan tersebut. Sehingga dapat dikatakan sebuah kebijakan dapat terwujud melalui tahapan tertentu yang dapat disebut dengan implementasi. Selain itu implementasi suatu kebijakan dalam menjalankan suatu proses dapat melihat peraturan yang ada seperti peraturan perundang-undangan, peraturan presiden ataupun

peraturan daerah. Kesimpulannya ialah dalam menjalankan implementasi suatu kebijakan dengan mempertimbangkan tujuan yang dilakukan dengan menjalankan peraturan yang ada.

Hasil penelitian pada implementasi program E-Warung dalam pemberdayaan masyarakat miskin ini di Dinas Sosial Kota Batu menunjukkan bahwa implementasi terdapat tahapan-tahapan yang dapat dijalankan agar program yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik. Tahapan program yang dilakukan mulai dari pengusulan proposal oleh Dinas Sosial hingga dengan proses pelaksanaan E-Warung.

Sesuai dengan pernyataan Ibu Lilik selaku kepala bidang pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial bahwa Program E-Warung ini merupakan salah satu program yang dibentuk oleh Kementerian Sosial. Masing-masing daerah akan mendapatkan dana bantuan ini tetapi ada beberapa tahapan program harus dilaksanakan. Tahapan awal adalah penyesuaian kuota pendirian E-Warung di masing-masing daerah, selanjutnya pengajuan proposal usulan yang dilakukan oleh para penyelia yang diserahkan ke Dinas Sosial Kota Batu, yang kemudian akan disalurkan ke Kementerian Sosial. Nanti penyaluran dana dan pelaksana kegiatan E-Warung ini akan dibantu oleh penyelia-penyelia yang sudah ditunjuk oleh Dinas Sosial.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tahapan implementasi program E-Warung dari awal pengusulan hingga kegiatan

program berlangsung sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga sudah terjadi koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat didalamnya. Program yang dilaksanakan dengan implementasi tahapan yang dilakukan sudah dianggap teratur dengan tahapan yang dibentuk.

a. Isi Kebijakan

1) Dasar hukum yang digunakan dalam program E-Warung

Program E-Warung merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penanggulangan kemiskinan yang ada dengan program bantuan usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Program E-Warung dijalankan dengan landasan hukum atau dasar hukum yang telah ditetapkan dari awal pembentukan program. Berdasarkan pembentukan program sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, bagian kelima pasal 19 yang mana menjelaskan bahwa fakir miskin dapat diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah dan terukur.

Selanjutnya hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Lilik selaku kepala bidang pemberdayaan bantuan dan jaminan sosial Dinas Sosial Kota Batu bahwa pembuat kebijakan E-Warung ini merupakan Kementerian Sosial. Dinas Sosial Kota Batu bertindak sebagai pelaksana program E-Warung. E-Warung ini dibentuk dengan berlandaskan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin.
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial.
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial.
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Pengembangan Saran Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha bersama Program Keluarga Harapan.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 Tahun 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti lapangan dapat disimpulkan bahwa Program E-Warung dibentuk oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian Dinas Sosial Kota Batu sebagai pembantu program dan bertindak sebagai pelaksana khususnya yang bertugas pelaksana di Kota Batu.

2) Manfaat dari adanya Program E-Warung

Pada poin ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan (Agustino, 2016:142). Pada pelaksanaan ataupun implementasi program yang dibentuk pastinya akan memberikan manfaat yang baik untuk penerima program tersebut. Begitu juga dengan adanya program E-Warung ini pastinya akan memberikan manfaat yang baik untuk berlangsungnya kegiatan program E-Warung ini. Manfaat yang diperoleh masing-masing anggota E-Warung dalam hal ini mempunyai beberapa manfaat yang dapat diperoleh.

Manfaat yang diperoleh dari adanya program E-Warung ini ialah dapat meningkatkan penghasilan, hal ini dikarenakan anggota kelompok pengelola E-Warung mempunyai penghasilan tambahan dari hasil usaha

bersama. Disamping penghasilan dari mata pencaharian utama dari para anggota pengelola E-Warung yang dalam hal ini merupakan salah satu tujuan dari adanya program E-Warung untuk penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin. Hal ini sesuai dengan teori implementasi program dari Korten dalam Akib dan tarigan (2008 : 12) yang menyatakan bahwa kesesuaian antara program dengan pemanfaat yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Mbak Hana selaku kordinator PKH Kota Batu yang berpendapat bahwa adanya program E-Warung ini memberikan manfaat kepada penerima kelompok pengelola E-Warung yang mana bukan hanya penghasilannya meningkat dengan adanya program E-Warung ini tetapi juga adanya manfaat yaitu kebersamaan dan kekeluargaan dalam kelompok dapat meningkat. Pernyataan ini juga sesuai dengan pendapat menurut Kementerian Sosial (2017 : 5) yaitu melalui program E-Warung ini dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, kepedulian dan kesetiakawanan sosial, baik diantara keluarga penerima bantuan dana E-Warung ataupun dengan masyarakat luas.

3) Harapan yang diinginkan dari program E-Warung

Perubahan yang diinginkan dalam suatu program dapat berupa harapan yang dimiliki. Harapan selalu dipunyai ketika suatu program akan dibentuk dan dilaksanakan. Grindle dalam Agustino (2016 : 142)

menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran yang semula telah diperinci. Perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan harus mempunyai sasaran dan tujuan yang jelas yaitu salah satunya ialah program E-Warung yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberdayaan dalam melakukan penanggulangan kemiskinan.

Tujuan dari pembentukan program E-Warung ini tidak lepas dari harapan yang diinginkan oleh penerima bantuan E-Warung. Tujuan dari E-Warung ialah untuk pegentasan kemiskinan para keluarga penerima manfaat yang mana disini adalah para kelompok PKH yang menerima bantuan program. Para pihak yang terkait dalam program E-Warung ini mempunyai harapan yang baik untuk anggota kelompok E-Warung dengan program ini.

Sesuai dengan pernyataan dari Mbak Hana selaku kordinator PKH bahwa dengan adanya dana bantuan usaha E-Warung diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan dari anggota kelompok pengelola E-Warung ini melalui usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Masing-masing anggota kelompok mempunyai pekerjaan utama masing diharapkan dengan usaha E-Warung ini yang dilakukan secara bersama-sama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program E-Warung dilaksanakan dengan harapan agar masyarakat miskin mampu melakukan usaha atau pemberdayaan yang dilakukan

secara bersama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha kesejahteraan sosial mempengaruhi pemberdayaan yang ada dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan Kementerian Sosial (2016 : 6) tentang usaha kesejahteraan sosial merupakan serangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan sosial ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan kemampuan atau pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kemampuan atau pemberdayaan masyarakat serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber sosial yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu adanya program E-Warung dapat meningkatkan kemampuan anggota dalam melakukan usaha dalam pemberdayaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan, harapan dari para anggota kelompok yang mendapat dana bantuan E-Warung ini ialah dapat meningkatkan pendapatan mereka dengan berkembang usaha yang ada di E-Warung dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapan ini juga sesuai dengan harapan yang diinginkan dari adanya program E-Warung.

4) Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program E-Warung

Sebuah implementasi pihak yang terlibat merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu pelaksanaan program. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Wahab (2012 : 133) bahwa implementasi program ditetapkan dengan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama

diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor ataupun organisasi. Program E-Warung dijalankan atas kordinasi dari pihak yang terlibat yang bertanggung jawab dalam implementasi program E-Warung meliputi:

- a. Kementerian Sosial
- b. Dinas Sosial Kota Batu
- c. Bank: BNI/BRI (Pusat dan Daerah)
- d. Kube Jasa
- e. KMIS (Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera)
- f. Camat, Lurah/Kepala Desa, Ketua RW/RT, dan Tokoh Masyarakat
- g. TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan)
- h. Penyelia E-Warung
- i. Anggota Kelompok E-Warung

Masing-masing pihak yang terlibat dalam implementasi program E-Warung mempunyai peran, tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Selain itu dalam impementasi program E-Warung diperlukan kerja sama yang baik antar pihak yang terlibat. Dengan adanya kerja sama yang baik dalam pelaksanaan program E-Warung, tujuan dari yang diharapkan dapat tercapai.

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan bahwa semua aktor yang terlibat dalam implementasi program

E-Warung di Kota Batu mempunyai peran yang penting untuk pelaksanaan program E-Warung. Keseluruhan pihak yang terlibat ialah Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kota Batu, Bank BNI/BRI, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Penyelia E-Warung, maupu para pengelola E-Warung. Masing-masing pihak yang terlibat sudah bekerja sama dengan baik. Hal ini sesuai dengan teori implementasi program dari Korten dalam Akib dan Tarigan (2008 : 12) yang menyatakan bahwa kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang diisyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

5) Sumber daya finansial yang digunakan dalam implementasi Program E-Warung

Sumber daya finansial juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan suatu program. Agustino (2016 : 142) menyatakan bahwa faktor sumber daya mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumberdaya-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dijelaskan bahwa sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi suatu program ialah sumber daya manusia dan sumber daya pendanaan atau finansial. Dana implementasi program E-Warung yang dikeluarkan untuk program ini ialah berasal dari dana APBN. Dana program E-Warung yang diberikan

kepada kelompok pengelola E-Warung berdasarkan usulan yang telah disetujui Kementerian Sosial.

Berdasarkan pendapat dari Bu Lilik Selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial bahwa besaran dana bantuan yang diberikan kepada kelompok penerima E-Warung berasal dari APBN. Dana bantuan yang diberikan kepada kelompok adalah Rp. 30.000.000, 00 dana bantuan itu akan disalurkan melalui rekening yang telah dibuat oleh masing-masing ketua kelompok dan bendahara yang dalam prosesnya akan dibantu oleh Dinas Sosial dan pihak Bank. Setelah dana bantuan itu diterima kelompok, dana sebanyak dua puluh juta akan digunakan sebagai modal E-Warung dan sepuluh juta digunakan untuk pendirian E-Warung.

Dari hasil penelitian di lapangan bahwa dana yang diperlukan dalam proses pelaksanaan E-Warung untuk saat ini berasal dari APBN. Bantuan yang diberikan kepada kelompok E-Warung sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Bantuan yang telah diterima oleh kelompok E-Warung digunakan untuk pendirian E-Warung dan modal E-Warung yang mana diharapkan dapat meningkatkan penghasilan dari kelompok penerima E-Warung. Proses pengusulan sampai pencairan dana bantuan E-Warung berjalan dengan baik dan bantuan yang diberikan kepada kelompok E-Warung dapat digunakan sesuai dengan tujuannya.

b) Konteks Implementasi

1) Strategi aktor yang terlibat dalam implementasi Program E-Warung

Menurut Sumodiningrat dalam Indrajit (2014 : 4) pemberian modal usaha merupakan strategi memberdayakan ekonomi masyarakat, caranya dengan mengembangkan mekanisme penyaluran dana bantuan dan kredit lunak langsung kepada masyarakat untuk mengembangkan kegiatan sosial ekonomi produktif unggulan sehingga dapat menjamin surplus untuk tabungan dan akumulasi modal masyarakat.

Program E-Warung merupakan salah satu program yang dibentuk untuk menanggulangi kemiskinan yang ada melalui pemberdayaan masyarakat miskin. Program E-Warung pada pelaksanaan sasarannya merupakan masyarakat miskin yang terdiri dari beberapa orang dalam satu kelompok PKH yang tinggal di lingkungan yang sama akan membuat usaha E-Warung yang sifatnya bersama dengan dana bantuan yang diberikan. Menurut Suharto (2009 : 16) menyatakan hakikat dari kemiskinan menunjukkan pada kesulitan dalam bidang ekonomi yang dialami oleh seseorang atau dapat dikatakan ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah melalui program E-Warung dalam rangka pemberian bantuan usaha bersama masyarakat yang kurang mampu.

Adanya program E-Warung ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dari masing-masing anggota kelompok E-Warung dengan pemberdayaan masyarakat miskin. Implementasi program E-Warung ini perlu menggunakan strategi yang digunakan agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Strategi yang akan dilakukan terkait program E-Warung ini dari pelaksanaan awal sampai implementasi program berjalan. Strategi yang dibuat oleh masing-masing aktor dan instansi terkait dengan program E-Warung dapat digunakan untuk membantu mempermudah terwujudnya tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan, strategi yang diterapkan aktor yang terlibat dalam implementasi program E-Warung. Strategi yang dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan beberapa pihak yang terlibat didalamnya. Strategi tersebut sesuai dengan strategi yang diungkapkan Ibu Lilik selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial Di Dinas Sosial Kota Batu yaitu ialah melakukan pembinaan kepada penyelia yang sudah ditunjuk. Hal ini bertujuan agar penyelia dapat mengetahui hal apa sajakah yang ada di dalam E-Warung, nantinya jika ada permasalahan yang ada dalam E-Warung maka penyelia dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik.

2) Tanggapan para anggota pelaksana program E-Warung

Kebijakan yang telah dibuat pastinya ada beberapa tanggapan-tanggapan dari masing-masing penerima dari kebijakan tersebut. Ada berbagai tanggapan dari penerima bantuan dalam pemberian dana program E-Warung. Tanggapan tersebut berfungsi sebagai masukan untuk penyelenggara program E-Warung.

Dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan terdapat berbagai tanggapan yang diberikan kepada aktor yang terlibat dalam implementasi program E-Warung maupun dari kelompok penerima bantuan program E-Warung ini. Tanggapan positif diberikan oleh penerima bantuan E-Warung ataupun aktor dan pihak yang terlibat dalam program E-Warung ini. Sesuai dengan pernyataan yang diberikan Mbak Nana selaku penyelia E-Warung bahwa tanggapan yang diberikan penerima bantuan program E-Warung ini sangat baik. Para kelompok penerima ini merasa bersyukur karena diberikan dana bantuan usaha E-Warung.

Tanggapan dari Ibu Sri Wahyuni selaku penerima bantuan E-Warung ini merasa sangat senang sekali. Menurut tanggapan dari penerima bantuan bahwa dengan adanya program E-Warung ini bukan cuma mendapatkan bantuan usaha tetapi ada pula simpan pinjam atau dana kesetiakawanan yang dapat digunakan saat keadaan mendesak. Berdasarkan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial bab 1 pasal 1 bahwa kesejahteraan

sosial adalah kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesimpulannya bahwa tanggapan positif diberikan kepada aktor yang terlibat dan anggota kelompok penerima bantuan.

c. Hasil Kebijakan

1) Dampak yang diberikan oleh program E-Warung

a. Dampak tidak terlihat (*outcome*)

Kebijakan yang dibuat akan selalu memberikan perubahan ataupun dampak terhadap sasaran dalam setiap program. Dampak atau perubahan yang diinginkan dari setiap kebijakan merupakan suatu kebijakan ke arah yang lebih baik lagi bagi penerima bantuan suatu program. Dampak kebijakan juga dibedakan antara *Policy Impact/Outcomes* dan *Policy Output*. *Policy Outcomes* adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilakukannya suatu kebijakan. *Policy Output* adalah apa yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dari pengertian ini, maka dampak mengacu pada perubahan yang diakibatkan oleh suatu implementasi kebijakan (Abdul Wahab, 2005:62). Program E-Warung juga diharapkan dapat memberikan dampak atau perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat penerima bantuan ini.

Dampak tidak terlihat (*outcome*) dengan adanya bantuan program E-Warung adalah meningkatkan kesadaran dari para anggota kelompok untuk menjalin kebersamaan dengan para anggota lain. Kesadaran dan kebersamaan penerima bantuan E-Warung dapat meningkat karena memang pengelolaan E-Warung ini dilakukan secara bersama-sama, jadi sifat gotong royong akan selalu tumbuh dalam pelaksanaan E-Warung. Dari hasil penelitian yang ada dilapangan penjelasan tersebut sesuai dengan pernyataan dari Mbak Nana selaku penyelia E-Warung Desa Songgokerto. Hal tersebut sesuai dengan kemitraan usaha menurut Kementerian Sosial (2014 : 7) bahwa kerjasama yang setara antar perorangan, kelompok, organisasi yang memiliki komitmen untuk bekerja sama saling menguntungkan sehingga program dan kegiatan usaha ekonomi produktif dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

b) Dampak terlihat (*output*)

Menurut Grindle tujuan kebijakan tercapai salah satunya dengan melihat dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu atau kelompok (Agustino 2016:143). Selain adanya dampak yang tidak terlihat, program E-Warung juga memberikan dampak yang terlihat. Dampak terlihat ini dapat disebut juga dengan *output*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menurut Mbak Nana selaku penyelia E-Warung Desa Songgokerto bahwa dampak atau perubahan yang diberikan program E-Warung terhadap penerima bantuan yaitu berdampak positif dan juga baik. Dampak yang terlihat bagi kelompok penerima bantuan

ialah penghasilan dari masing-masing anggota meningkat dalam usaha yang dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut membuat para anggota meningkat dalam mengelola usaha E-Warung yang dilakukan secara bersama-sama. Hal tersebut membuat para anggota kelompok E-Warung mempunyai penghasilan tambahan dengan melakukan usaha bersama-sama. Dari penelitian yang sudah dilakukan maka pernyataan ini sesuai dengan adanya pemberdayaan sosial menurut Kementerian Sosial (2014 : 5) menyatakan bahwa semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial sehingga mempunyai daya dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

2) Perubahan yang diperoleh dengan adanya program E-Warung

Program dinyatakan berhasil jika mempunyai perubahan yang terlibat sebelum adanya dan sesudahnya program berlangsung. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kementerian Sosial (2017:10) yang menyatakan bahwa melalui E-Warung diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan berfikir para anggota karena mereka nantinya dituntut mempunyai suatu kemampuan manajerial untuk mengelola sendiri usaha yang sedang dijalankan dan berupaya menggali sumber-sumber yang tersedia di lingkungan untuk keberhasilan anggotanya. Adanya program E-Warung ini memberikan perubahan yang baik untuk para anggota E-Warung yang telah disampaikan Bu Lilik yang mana sebelum adanya program para anggota tidak mempunyai pekerjaan sampingan yang dapat meningkatkan pendapatan dari anggota E-Warung.

Selain itu juga perubahan yang diberikan program E-Warung ini kepada para anggotanya juga bukan hanya dari segi ekonomi tetapi dari segi sosial. Memang tujuan E-Warung bukan hanya meningkatkan taraf kesejahteraan anggota kelompok E-Warung dengan kegiatan usaha bersama, tetapi dengan adanya program E-Warung ini diharapkan dapat meningkatkan kesetiakawanan dari para anggota. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Mbak Nana yaitu dengan adanya program E-Warung ini membuat komunikasi antar anggota PKH penerima program E-Warung semakin baik dan akrab satu dengan yang lainnya.

2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat dari implementasi program E-Warung

a. Faktor Pendukung

Kamus Webster menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai saran yang mendukung sehingga nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu tersebut (Wahab, 2008:67). Hasil penelitian yang ada di lapangan menyebutkan bahwa ada tiga faktor pendukung dalam implementasi program E-Warung: 1) Adanya koordinasi yang baik antara aktor yang terlibat di dalam program E-Warung, 2) E-Warung sebagai titik pendistribusian bantuan sosial non tunai, 3) Adanya ketepatan sasaran yang ditunjukkan oleh program E-Warung dengan ketentuan yang berlaku.

Koordinasi atau komunikasi antara aktor yang terlibat merupakan salah satu hal yang penting dari sebuah kebijakan. Agustino (2016 : 133) komunikasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi suatu kebijakan yang dapat dilakukan dengan sosialisasi. Koordinasi yang dilakukan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam program E-Warung ini akan terjalin dengan baik jika adanya kerjasama dilakukan secara rutin oleh pihak-pihak yang berhubunga atau yang terlibat langsung.

b. Faktor Penghambat

Implementasi suatu program ataupun suatu kebijakan pasti didalamnya terdapat permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang ada menjadikan faktor penghambat untuk pelaksanaan program. Begitu juga dengan pelaksanaan program E-Warung yang ada di Kota Batu. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, ada tiga faktor penghambat dari implementasi program E-Warung ialah: 1) Kurangnya kualitas sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program E-Warung, 2) Kurangnya sosialisasi dan tidak adanya buku pedoman yang mengatur tentang E-Warung, 3) Kurangnya konsistensi dari Pemerintah Pusat dalam mengatur kebijakan tentang program E-Warung.

Dari penelitian yang telah dilakukan di lapangan ditemukan faktor penghambat selanjutnya ialah kurangnya kualitas dari sumber daya manusianya. Dalam pelaksanaan program E-Warung, sumber daya manusia dibutuhkan untuk menunjang program tersebut agar bisa berjalan

dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Mbak Nana selaku penyelia E-Warung menyatakan bahwa kurangnya kualitas dari anggota ditandai dengan kesusahannya anggota pengelola dalam mengoperasikan mesin EDC, kesusahan anggota berkaitan dengan penggunaan teknologi terkini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti di bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan pada penelitian yang berjudul “Implementasi E-Warung dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin (Studi di Dinas Sosial Kota Batu)” ialah sebagai berikut:

1. Program E-Warung ini dibentuk bertujuan untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan. Manfaat dengan adanya program E-Warung ini dapat diketahui menjadi tiga yaitu dalam bidang kelembagaan yang bermanfaat dapat meningkatkan kerjasama yang baik antar anggota, bidang sosial bermanfaat dapat menumbuhkan kesadaran dan kemauan dari anggota kelompok E-Warung untuk merubah kondisi menjadi lebih baik dari bidang ekonomi bermanfaat untuk meningkatkan kehidupan ekonomi dari masing-masing anggota E-Warung. Dalam pelaksanaan program E-Warung aktor pelaksana dari pusat ialah Kementerian Sosial yang bertindak sebagai pembuat kebijakan. Selanjutnya pelaksana di daerah meliputi Dinas Sosial selaku implementor dibantu oleh penyelia E-Warung dan anggota pengelola E-Warung. Program E-Warung memberikan dampak dan perubahan terhadap pemberdayaan masyarakat miskin di Kota

Batu hingga saat ini. Para anggota penerima bantuan E-Warung ini dapat meningkatkan penghasilan tambahan mereka dengan adanya program E-Warung ini. Selain itu program E-Warung ini memberikan kebersamaan antar anggota E-Warung menjadi lebih dekat karena mereka melaksanakan usaha bersama.

2. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam program E-Warung di Kota Batu. Faktor yang mendukung keberhasilan implementasi program E-Warung ini antara lain:
 - 1) Adanya koordinasi yang baik antara aktor yang terlibat di dalam program E-Warung, 2) E-Warung sebagai titik pendistribusian bantuan sosial non tunai 3) Adanya ketepatan sasaran yang ditunjukkan oleh program E-Warung dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan faktor yang menghambat keberhasilan implementasi program E-Warung ini ialah 1) Kurangnya kualitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan program E-Warung, 2) Kurangnya sosialisasi atau penyampaian informasi dalam pelaksanaan program E-Warung, 3) Kurangnya konsistensi dari Pemerintah Pusat dalam mengatur kebijakan tentang program E-Warung.

B. Saran

1. Perlu adanya pedoman atau petunjuk teknis E-Warung dalam pelaksanaan program E-Warung di lapangan. Hal ini bertujuan agar dalam implementasi program masing-masing pihak yang berperan tahu akan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

2. Peningkatan kualitas dari sumber daya manusia atau anggota pengelola E-Warung harus ditingkatkan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia atau anggota E-Warung ini dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan kepada pengelola E-Warung. Hal ini bertujuan agar masing-masing anggota E-Warung ini dapat berkembang sesuai jenis usaha yang dilaksanakan.
3. Perlunya konsistensi dari Pemerintah Pusat dalam membuat dan merumuskan kebijakan dalam program E-Warung. Hal ini bertujuan agar tujuan awal dari dibuatnya program E-Warung untuk pengentasan kemiskinan dapat tercapai dan tidak terjadinya kebingungan di pihak implementor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta
- Akib, Haedar dan Tarigan, Antonius. 2010. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik
- Badan Pusat Statistik (BPS), diakses dari <https://www.bps.go.id/subjek/view/id/23> , diakses pada tanggal 12 November 2017 pada jam 13.20
- Badan Pusat Statistik (BPS), diakses dari <https://www.bps.go.id/brs/view/1379> , diakses pada tanggal 10 Desember 2017 pada jam 20.30
- Elni Sumiarti. 2008. *Wirausaha Ibu Rumah Tangga Untuk Mengatasi Kemiskinan. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Oktober 2008 Volume 3 Nomor 2*. Politeknik Negeri Padang.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Rick Ismanto. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada.

- Kajian Awal Pelaksanaan Program E-Warung Kube PKH. 2017. Direktorat Jenderal Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, Dan Isu*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Kementerian Sosial (Kemensos). 2010 *Modul Pendampingan Pemberdayaan Keluarga*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- Kementerian Sosial (Kemensos). 2016 *Pedoman Teknis Pemberdayaan Fakir Miskin di Jawa Timur*. . Surabaya: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
- Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications*. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, Heru. 2006. *Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kesenjangan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan – Analisis Kebijakan – Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai. 2016. Direktorat Jenderal Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Supadi dan Achmad Rozany, 2008. *Kemiskinan dan Globalisasi : Pencarian Solusi Alternatif*. Penerbit Lapera Pustaka Utama Yogyakarta

Tachjan, Dr. H, M.Si. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jogjakarta: Caps Publishing.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Menteri Sosial No 8 Tahun 2017

ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG KELOMPOK USAHA BERSAMA
PROGRAM KELUARGA HARAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi dan perubahan kondisi pada pelaksanaan bantuan pengembangan sarana usaha melalui elektronik warung gotong royong kelompok usaha bersama program keluarga harapan, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG BANTUAN PENGEMBANGAN SARANA USAHA MELALUI ELEKTRONIK WARUNG GOTONG ROYONG KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9), sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bantuan KUBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berupa modal usaha dan modal kerja.
- (2) Modal usaha dan modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prosentase 25% (dua puluh lima persen) untuk modal usaha dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk modal kerja.

- 4 -

- (3) Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembelian bahan pangan pokok.
- (4) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk pembelian:
- listrik dengan kapasitas sebesar 900 (sembilan ratus) watt;
 - dihapus;
 - dihapus;
 - dihapus;
 - timbangan barang;
 - mesin pengemas hampa udara;
 - lemari pendingin; dan/atau
 - alat pengangkut barang.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dari pembelian modal kerja atau belum digunakan untuk pembelian modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), harus dimanfaatkan untuk modal usaha.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 901

Lampiran 2. Surat Riset



P E M E R I N T A H K O T A B A T U
D I N A S S O S I A L

Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 2
JL.Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu 65313
Telp (0341) 593434, Fax (0341) 593434

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 000/227 /422.115/2018

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ADITYA EVANDO MAHEZTRA**
Institusi : **UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**
NIM : **145030100111062**
Jurusan : **Ilmu administrasi Publik**

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Dinas Sosial Kota Batu pada tanggal 21 Februari s.d 21 April 2018 dengan Judul Penelitian "**Implementasi E-Warung dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin**"

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Batu , 07 Mei 2018

**An. KEPALA DINAS
SEKRETARIS**

Drs. TEGUH WIJAYANTO, M.Agr
Pembina Tk. I
NIP. 196109151986031016



Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi saat peneliti melakukan wawancara di Dinas Sosial kepada Ibu Lilik selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Bantuan dan Jaminan Sosial pada tanggal 19 Februari 2018.



Dokumentasi saat peneliti melakukan wawancara di Dinas Sosial kepada Mbak Hana selaku Kordinator PKH Kota Batu pada tanggal 19 Februari 2018.



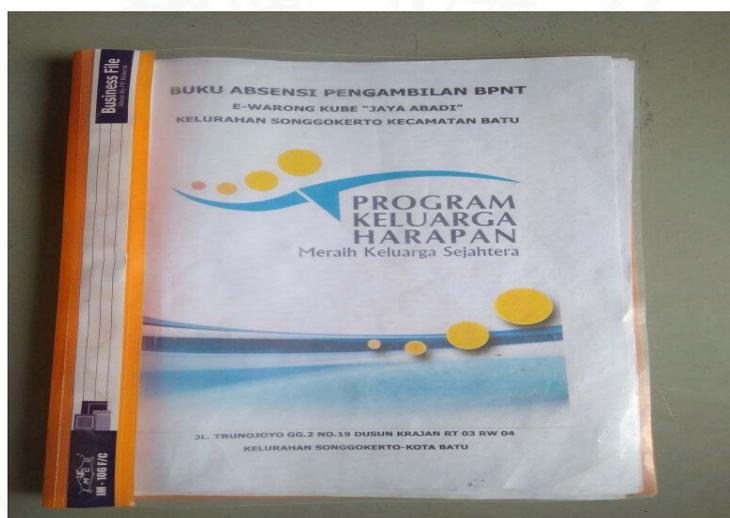
Dokumentasi saat peneliti melakukan wawancara di E-Warung Gunungsari kepada Ibu Rukiyati selaku Ketua E-Warung Sumber Rejeki pada tanggal 15 Maret 2018.



Dokumentasi saat peneliti melakukan wawancara di E-Warung Songgokerto kepada Mbak Nana selaku penyelia E-Warung Jaya Abadi pada tanggal 15 Maret 2018.



Dokumentasi Peneliti pada saat melakukan wawancara di E-Warung Sumber Rejeki Desa Gunungsari pada tanggal 15 Maret 2018



Buku Absensi pengambilan BPNT E-Warung Jaya Abadi Desa Songgokerto

ABSENSI PENGAMBILAN BPNT E-WARUNG JAYA ABADI SURUNGGI

NO	TGL	NAMA	ALAMAT	TAHAP	JMLH YG DIAMBIL				TTD
					B	M	G	T	
1		ZARONI	Rt 2 RW 3 Sumbarjo	2	2				1
2		WIBISONO	Rt 1 RW 3 Sumbarjo	2	2				1
3		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
4		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
5		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
6		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
7		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
8		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
9		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
10		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
11		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
12		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
13		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
14		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
15		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
16		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
17		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
18		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
19		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
20		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
21		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
22		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
23		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
24		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
25		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
26		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
27		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
28		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
29		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
30		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
31		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
32		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
33		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
34		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
35		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
36		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
37		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
38		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
39		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
40		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
41		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
42		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
43		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
44		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
45		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
46		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
47		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
48		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
49		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
50		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
51		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
52		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
53		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1
54		WIBISONO	Rt 1 RW 2 Sumbarjo	2	2				1

Buku Absensi pengambilan BPNT E-Warung Jaya Abadi Desa Songgokerto



Dokumentasi saat peneliti bersama para pengelola E-Warung Harapan pada tanggal 15 Maret 2018.